

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
RESPONSIBILITAS TERHADAP POTENSI KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Latifa Azzahra Fitri

No Mahasiswa: 21312103

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
RESPONSIBILITAS TERHADAP POTENSI KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi)**

SKRIPSI

Di susun dan diajukan untuk memenuhi sebagai
salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana
Strata-1 Progam Studi Akutansi pada Fakultas
Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Latifa Azzahra Fitri

No Mahasiswa: 21312103

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 17 Juni 2025

Penulis,


METERAI
TEMPEL
103B4AMX351013368
Latifa Azzahra Fitri

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN RESPONSIBILITAS TERHADAP POTENSI KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Latifa Azzahra Fitri
No Mahasiswa: 21312103

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 11 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



(Prof. Johan Arifin,S.E.,M.Si.,Ph.D.CFrA,CertIPSAS)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN RESPONSIBILITAS TERHADAP POTENSI
KECURANGAN (FRAUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Kasus Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)**

Disusun oleh : LATIFA AZZAHRA FITRI

Nomor Mahasiswa : 21312103

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 02 Juli 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS.Al-Insyirah : 5-6)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Qs.Ar-Ruum:60)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya tulis ini untuk:

Orang Tua tercinta:

Gunawan dan Maimunifa Yulianides,S.H.

Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta mama dan papa atas segala doa,dukungan,kasih sayang,dan pengorbanan yang tak ternilai sepanjang masa.Tanpa cinta,kesabaran dan dorongan dari Mama dan Papa penulis tidak akan mampu melewati setiap tantangan dalam menyelesaikan studi ini.Terimakasih kepada Mama yang tak pernah lelah melangitkan doa-doa terbaik dalam setiap sujudnya,menyelipkan harapan dan restu agar penulis ini mampu menyelesaikan perjalanan akademik dengan sebaik-baiknya. Kepada Papa,yang dengan keringat dan kerja kerasnya telah menjadi tiang penopang kehidupan kami,serta tak pernah ragu mengorbankan waktu dan tenaga demi pendidikan anak-anaknya.Tak lupa,atas segala bentuk dukungan materi yang diberikan tanpa pernah diminta,semua itu menjadi bahan bakar semangat yang terus menggerakkan langkah penulis hingga titik ini. Semoga Allah membalas setiap lelah dan doa yang tak terdengar oleh manusia, namun menggetarkan langit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, Puji Syukur Kehadirat Allah Swt Yang Telah Melimpahkan Berkah, Rahmat, Ridho, Rizki Dan Karunia-Nya Kepada Penulis. Sholawat Serta Salam Tercurah Kepada Nabi Muhammad Saw Beserta Keluarga Dan Para Sahabatnya. Akhirnya Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Dengan Judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Terhadap Potensi Kecurangan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Selama studi dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa mencurahkan dan memberikan petunjuk dan karunia-Nya serta melimpahkan rahmat dan kenikmatan yang sempurna, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi awal kemandirian dan jalan menuju ridho-Mu.
2. Orang tua tercinta Bapak Gunawan dan Ibu Maimunifa Yulianides, S.H., yang selalu memberi support, doa dan cinta yang tulus kepada Penulis. Terimakasih atas segala usaha dan kasih sayang yang diberikan kepada Penulis tanpa rasa kurang sedikit pun.

3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia, beserta segenap pimpinan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.CFrA,CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
5. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc.,Ph.D.,SAS,ASPM selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.CFrA,CertIPSAS selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Dr.Masrul Hakim selaku kepala Dinas BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah) Kab. Kuantan Singingi yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian dan membantu proses terselesainya penulisan skripsi.
8. Seluruh staff dan jajaran yang berada di dalam ruang lingkup BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah) Kab. Kuantan Singingi yang telah berkontribusi membantu penulis dalam pengambilan data penelitian skripsi.
9. Keluarga tercinta dan Abang Alghaniyyu Fajri, S.E., yang selalu memberikan support baik dari segi moril dan materil kepada Penulis yang telah mendukung selama perkuliahan dan terselesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik Penulis semasa perkuliahan yaitu Amalia Widi Utami, Dona Kholila Erista, Kurnia Nuraini, Yurik Prastika Rahayu,Masyrifawati SM, Nidaul Husna Nor Anjarwati, Muhammad Faqih, Ghifari Ghazy Abrar. Untuk semua susah senang , bahagia sedih dan canda tawa yang dilalui.

Terimakasih sudah memberikan warna pada perkuliahan ini, senang berjumpa dengan kalian semuanya.

11. Sahabat Alifah Dwi Mailendra, A.md.Kep. yang telah menemani dan kebersamai penulis sedari SMA hingga perkuliahan. Selalu menjadi tempat susah senang, bahagia sedih dan selalu mendorong penulis untuk kearah lebih baik.
12. Bripda Alfim Khabiru atas dukungan cinta dan pengertian yang tak terhingga kepada penulis. Keberhasilan ini tidak akan terwujud tanpa semangat dan motivasi yang selalu mendorong untuk terus maju.
13. *And the last*, kepada diri sendiri untuk telah bertahan sejauh ini mengikuti perkuliahan dengan baik yang awalnya penuh dengan keraguan tetapi bisa untuk melewatinya dengan ketekunan dan kesabaran yang penuh tantangan.
Bad days it will pas and good days will come.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas terhadap Potensi kekurangan dilingkungan pemerintahan daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26.0 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, dimana pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 61 responden. Sampel yang digunakan adalah seluruh perangkat pemerintahan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi meliputi pejabat pemerintahan, bendahara, sekretaris, dan pegawai yang bertugas menjalankan fungsi akuntansi. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan yang berarti semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin besar potensi fraud terdeteksi dan diminimalisir. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan. Responsibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan dilingkungan pemerintahan daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi)

Kata Kunci: Potensi kekurangan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of transparency, accountability and responsibility on Potential deficiencies in the local government environment (Case of the Financial and Regional Asset Management Agency of Kuantan Singingi Regency). The method used in this study is quantitative using SPSS software version 26.0 with a sampling technique using saturated sampling, where data collection through questionnaires distributed to 61 respondents. The sample used was all local government officials at the Financial and Regional Asset Management Agency of Kuantan Singingi Regency including government officials, treasurers, secretaries, and employees tasked with carrying out accounting functions. Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results of the analysis show that transparency has a positive and significant effect on the potential for fraud, which means that the higher the level of transparency, the greater the potential for fraud to be detected and minimized. Accountability has a positive and significant effect on the potential for fraud. Responsibility has a positive and significant effect on the potential for fraud in the local government environment (Financial and Asset Management Agency of Kuantan Singingi Regency)

Keywords: Potential for deficiencies (fraud), transparency, accountability and responsibility

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II	11
LANDASAN TEORI.....	11
2.1. Kajian Pustaka	11
2.2. Penelitian Terdahulu	31
2.3. Pengembangan Hipotesis	34
2.4 Kerangka Berfikir	38
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.3. Populasi dan Sampel.....	42
3.4 Metode Pengumpulan Data	43
3.5 Definisi Operasional Variabel	43
3.6 Teknik Analisis Data	49
3.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	49

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda	51
3.6.3 Pengujian Koefisien Determinasi	51
3.6.4 Pengujian Koefisien Korelasi	52
3.6.5 Pengujian Hipotesis	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Gambaran Umum Penelitian	56
4.2 Karakteristik Responden	56
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	57
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	58
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	58
4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	59
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	61
4.3.1 Uji Validitas.....	61
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	62
4.4 Uji Asumsi Klasik	63
4.4.1 Uji Normalitas	63
4.3.2 Uji Multikolinieritas	63
4.3.3 Uji Heterokedastisitas.....	64
4.3.4 Uji Autokorelasi	65
4.5 Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
4.6 Pembahasan	68
BAB V	75
KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Keterbatasan Penelitian	76
5.3 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	44
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden	57
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir	58
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	59
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	59
Tabel 4. 6 Analisis Statistik Deskriptif	60
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas	61
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas	62
Tabel 4. 9 Uji Normalitas	63
Tabel 4. 10 Uji Multikolinieritas	64
Tabel 4. 11 Uji Heterokedastisitas	64
Tabel 4. 12 Hasil Uji Autokorelasi.....	65
Tabel 4. 13 Persamaan Regresi Linier Berganda	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan responsibilitas menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan adil adalah landasan penting untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah daerah. Hal ini melibatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk memastikan keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan berkeadilan (Schick, 2020). Prinsip-prinsip ini memainkan peran krusial dalam menghindari potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan penuh integritas dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Albrecht *et al.*, 2019).

Transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam lembaga pemerintahan menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, lembaga pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat dan dana publik yang dikelola dilakukan dengan penuh integritas dan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah

telah semakin menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan (Albrecht *et al.*, 2019).

Kecurangan sering kali menjadi masalah yang meresahkan di lingkungan instansi pemerintah daerah karena lembaga-lembaga ini memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya publik yang besar. Banyaknya dana dan kebijakan yang dikelola oleh instansi pemerintah dapat menjadi sasaran tindakan kecurangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau manipulasi informasi. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan masyarakat.

Penting untuk dipahami bahwa kecurangan dalam instansi pemerintah tidak hanya bersifat finansial, namun juga dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan secara adil dan transparan. Kecurangan dapat mengganggu integritas dan legitimasi lembaga pemerintah, merusak kepercayaan masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan.

Pentingnya mencegah dan menangani *fraud* di instansi pemerintah merupakan fokus utama, karena hal ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, integritas lembaga pemerintah, dan penggunaan yang benar dari dana publik. Kasus penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi informasi yang menguntungkan pihak tertentu telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dalam konteks ini, sebagai bagian dari struktur pemerintahan lokal daerah maupun pusat tidak luput dari tantangan

ini. Kekurangan dalam sistem transparansi dan kurangnya akuntabilitas dalam proses pengelolaan anggaran serta sumber daya publik telah memicu ketidakpastian dan keraguan masyarakat terhadap kinerja instansi ini. Namun, peran transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah fraud bukanlah sekadar peningkatan akses informasi. Hal ini juga melibatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pertanggungjawaban atas tindakan, serta mekanisme hukuman dan insentif yang jelas bagi pelaku pelanggaran (Bank, 2020).

Dalam mewujudkan pengembangan pengelolaan dana di instansi pemerintahan, pemerintah pusat memberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pemerintah daerah memberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut pada akhirnya melahirkan program dana yang dimulai pada tahun 2019 dalam pengelolaannya tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya fraud atau kecurangan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecurangan tersebut seperti tekanan, kesempatan, kondisi finansial, atau juga karena keserakahan. Kemungkinan terjadinya fraud dapat diantisipasi dengan menerapkan prinsip *governance*.

Pada tahun 2019 lahir program dana daerah yang mengakibatkan berbagai tuntutan mengenai akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan dalam pengelolaan dana oleh instansi pemerintahan. Demi menciptakan instansi yang maju, pegawai pemerintahan

harus dapat memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah harus memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas. Dalam memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi, dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan. Penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri. Pemerintah merupakan sorotan publik atas pertanggung jawaban pada pengelolaan keuangan berupa Laporan Keuangan yang merupakan salah satu ukuran kinerja dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah dari tahun ketahun yang berkelanjutan sudah membaik dan baik.

Menurut Sjamsiar (2020) responsibilitas adalah penerapan penilaian dalam standar penerapan kegiatan yang dibuat untuk disesuaikan dengan

kondisi dan situasi yang dihadapi, jika sudah sesuai maka manajemen mempunyai tanggungjawab dalam menjalankan ukuran-ukuran tersebut. Banyak penelitian yang menyatakan bahwasanya transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas pada tingkat fraud di lingkungan pemerintahan memiliki keterkaitan dalam meningkatkan kinerja pemerintah yang baik, di antaranya (Auditya *et al.*, 2021) penelitiannya menyatakan Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan suatu daerah di setiap OPD, maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu.

Menurut KNKG (2006) di dalam *Good Corporate Governance* ada lima prinsip yang harus diterapkan oleh instansi pemerintahan, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan apakah dapat mencegah sebuah fraud yang dipandang dari sudut teori Triangle Fraud. Objek penelitian ini adalah karyawan Bank Perkreditan Rakyat pada wilayah Kota Semarang dan Kabupten Demak dengan menyebarkan kuesioner (Sudarmanto *et al.*, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Riswanto (2020) menyatakan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas yang dilakukan secara baik, sesuai,

dipertanggungjawabkan, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa transparansi yang diinformasikan ke publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan benar, sesuai dan seksama, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Umar *et al.*, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155. Hasil penelitian ini akan memberikan dampak bahwa akuntabilitas memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh.

Qodariah (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas anggaran berbasis kinerja, transparansi anggaran berbasis kinerja, secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang. Akuntabilitas anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang, transparansi anggaran berbasis kinerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

Perbedaan hasil penelitian yang berlawanan tersebut mendorong untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian sebelumnya dilakukan di

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang tahun 2022 yang dilakukan oleh Lailatul Qodariah, sedangkan penelitian ini untuk melihat tingkat transparansi akuntabilitas pada *fraud* di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas pada lembaga pemerintahan serta menyoroti potensi perbaikan dalam upaya pencegahan *fraud*. Penelitian juga bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep-konsep transparansi dan akuntabilitas dalam mengurangi risiko terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintahan, khususnya pada *fraud* di lingkungan pemerintahan.

Dalam konteks ini, urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dapat mengurangi potensi terjadinya *fraud* di institusi pemerintah daerah pada umumnya, serta memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap masalah ini. Hasil penelitian dapat menjadi Stimulasi Penelitian Lanjutan berupa sumber inspirasi bagi penelitian-penelitian mendatang di bidang terkait, mendorong eksplorasi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas di lingkungan pemerintah daerah khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan terkait upaya pencegahan *fraud* di institusi pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul

“PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN RESPONSIBILITAS TERHADAP POTENSI KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap potensi kecurangan di lingkungan pemerintahan daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi) ?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan di lingkungan pemerintahan daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi) ?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan di lingkungan pemerintahan daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi) ?

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat digunakan bagi instansi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam peningkatan kinerja yang transparansi bagi pemerintah untuk kemajuan masyarakat dalam meningkatkan kesetaraan hidup.

2. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas terhadap tingkat *fraud* di lingkungan pemerintahan. Sehingga memberikan gambaran pemahaman yang luas dan menjadi wawasan khusus untuk mengetahui pengelolaan pada instansi pemerintah daerah.
3. Penelitian ini diharapkan menambah referensi kepustakaan Universitas Islam Indonesia dan dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa yang memerlukan untuk menyusun skripsi.

1.4 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, pada bab I merupakan pendahuluan yang mengungkapkan secara ringkas apa yang menjadi latar belakang peneliti dalam penelitian ini, sehingga dari latar belakang masalah yang ada bisa dibuat rumusan masalah.

Pada bab II merupakan kajian teori yang di dalamnya membahas mengenai teori-teori mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat *fraud* di lingkungan pemerintahan seperti pengertian, tranparansi, akuntabilitas, pencegahan *fraud* atau penipuan dalam instansi pemerintah, kinerja instansi pemerintah dan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik semua vaiabel penelitian yang mempengaruhi dari setiap variabel dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan temuan penelitian yang akan diperoleh. Kemudian hipotesis penelitian yang merupakan dugaan sementara dalam penelitian ini yang akan dicari kebenarannya.

Pada bab III merupakan metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, instrumen penelitian, pengujian hipotesis yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan.

Pada bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian yang akan diteliti untuk mendeskripsikan paparan hasil penelitian. Dilanjutkan dengan hasil uji penelitian dan analisis data untuk memaparkan atas hasil penelitian yang peneliti lakukan selama penelitian berlangsung, serta jawaban dari hipotesis penelitian yang telah dirumuskan.

Pada bab V merupakan penutup untuk mengemukakan kesimpulan dan saran secara singkat dan jelas yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan teori-teori dan penjelasan dari variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai jawaban dari permasalahan penelitian secara teori. Adapun beberapa teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam pemerintahan untuk menganalisis hubungan antara principal dan agen digunakan teori keagenan. Agen adalah pihak yang melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal-prinsipal, sedangkan prinsipal adalah pihak yang membuat kontrak dengan pihak agen dengan harapan agen dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan harapan prinsipal (Dini, 2022). Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah Kota, pemerintah daerah sampai pemerintah desa (*agents*) dengan Masyarakat (*prinsipals*).

Pada dasarnya pemerintah di Indonesia secara langsung dan atau tidak langsung, teori agensi telah di praktikan. Teori keagenan terlihat dalam penyusunan anggaran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran yang telah disahkan dan pemerintah daerah bertanggungjawab atas wewenang yang

telah diberikan untuk menyejahterakan masyarakat (Zelmiyanti, 2020).

Negara demokrasi modern pada serangkaian hubungan pada dasarnya memiliki prinsipal dan agen. Hubungan prinsipal dan agen ini sangatlah penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Model keagenan yang sederhana terdapat dua pilihan model kontrak : 1. *Behavior-based*, yaitu prinsipal memonitor perilaku agen dan 2. *Outcome-based*, yaitu adanya insentif untuk memotivasi agen untuk mencapai kepentingan prinsipal. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud prinsipal adalah rakyat dan agen pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kota Magelang. Teori keagenan beranggapan bahwasannya banyak terjadi *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen (Dini, 2022).

Berdasarkan Teori keagenan, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang artinya *information asymmetry* dapat berkurang, sehingga tindak pidana korupsi semakin kecil.

2.1.2 Good Governance

Good governance merupakan masalah yang paling penting dalam mengelola administrasi publik saat ini. Pemerintah dituntut untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, dimana pemerintah harus sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan halnya penggunaan anggaran yang telah di rancang sebelumnya. menyatakan bahwa *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif yang berjalan. Definisi tersebut mengasumsikan aktor-aktor yang terlibat, tidak ada yang mendominasi dalam menentukan arah gerak aktor lainnya. Sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif (Ihyaul & Sofyani, 2020).

2.1.3 Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan bagian dari karakteristik *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh pemangku kepentingan.

Licht berpendapat bahwa transparansi didasarkan pada teori keagenan, legitimasi, dan demokrasi. Sementara itu, teori keagenan

merujuk pada hubungan keagenan, yang merupakan kontrak antara satu atau lebih pelaku (*principal*) yang membagikan mandat kepada pelaku (*agent*) lainnya untuk mengerjakan tindakan atau kewenangan tertentu atas nama atasannya dalam proses pengambilan keputusan. Teori legitimisasi mengacu pada keyakinan atau keyakinan bahwa tindakan yang diinginkan adalah tepat pada sistem yang terdiri dari norma sosial, nilai, kepercayaan dan definisi (Sumantri, 2023).

Dalam ranah keuangan publik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang Keuangan Negara, menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan publik. Laporan keuangan merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, yang berarti laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat mengenai akuntabilitas dan transparansi.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan sumberdaya publik tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Mardiasmo (2021) tujuan dari transparansi dalam

pelaksanaan sistem pemerintah daerah maupun pusat sebagai berikut:

1. Transparansi sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Transparansi sebagai usaha pengembangan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
3. Transparansi sebagai usaha pengembangan tata kelola dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik serta sebagai usaha untuk menghilangkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi yang mudah untuk dimengerti dan diakses (dana/biaya, metode pengimplementasian, program kegiatan).
2. Tersedianya media dan publikasi yang berkaitan dengan prosedur aktivitas serta rincian keuangan.
3. Tersedianya laporan secara periodik tentang penyalahgunaan sumber daya pada proses kemajuan rencana kerja yang bisa diakses oleh publik.
4. Laporan tahunan
5. Media publikasi instansi atau situs web yang sudah diatur.
6. Pedoman untuk penyebaran informasi

Prinsip dan asas transparansi bukan hanya mengenai hal yang

berkaitan dengan keuangan saja, tetapi transparansi pemerintahan pada perencanaan pun mencakup 5 (lima) hal antara lain:

1. Keterbukaan dalam pertemuan-pertemuan fundamental yang mana publik ikut menyampaikan aspirasinya.
2. Keterbukaan dalam pengungkapan informasi terkait dokumen yang harus diketahui publik.
3. Keterbukaan mengenai tata cara (proses pengambilan keputusan dan prosedur perencanaan).
4. Keterbukaan catatan yang memuat kebenaran hukum (buku tanah, catatan sipil dan lain-lain).
5. Keterbukaan untuk menerima partisipasi masyarakat

Prinsip transparansi dapat mewujudkan kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah dengan menyediakan informasi yang benar, tepat serta lengkap. Secara umum transparansi akan menghilangkan rasa keraguan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan, selain itu transparansi dapat mengurangi kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi dalam lingkungan pemerintah daerah karena keikutsertaan partisipasi masyarakat ketika pengambilan keputusan.

3. Indikator Transparansi

Transparansi mengarah pada pemberian dan ketersediaan

informasi kepada masyarakat umum, keterbukaan Undang-Undang, peraturan serta keputusan pemerintah, dengan beberapa yang menjadi indikatornya.

Menurut Yasmita & Nawawi (2021) untuk menciptakan nilai transparansi dilembaga publik dapat diukur berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Terdapat atau tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
2. Terdapatnya kemudahan akses bagi publik terhadap transparansi penyusunan anggaran
3. Terdapatnya audit yang efektif serta independen.
4. Terdapatnya campur tangan atau keterlibatan publik mengenai pembuatan dan penyusunan anggaran.

2.1.4 Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak *agen* (pemegang amanah) untuk mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak *principal* (pemberi amanah) yang memiliki hak serta kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban *agent* dalam memper- tanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai misi atau tujuan organisasi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2021).

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah- langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan dalam menjalankan organisasi, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja organisasi tersebut.

2. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Ellwood (1993) terdapat 4 (empat) dimensi akuntabilitas antara lain :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) mengacu pada penegakan hukum serta peraturan lain yang diperlukan untuk penerapan dana publik. *Accuntability for probity* mengacu pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

2. Akuntabilitas proses

Untuk menilai prosedur yang dilaksanakan pada pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana dengan tepat atau belum dalam kaitannya dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi, inilah yang di maksud dalam akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, tanggap, dan hemat biaya.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program lebih memperhatikan terkait sasaran yang

sudah ditentukan bisa terwujud atau tidak, dan juga memperhatikan preferensi kegiatan program yang menunjukkan hasil terbaik dengan menggunakan biaya terendah.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah mengenai prosedur yang dibuat oleh pemerintah bagi DPRD dan masyarakat luas. Menguatnya tuntutan akuntabilitas tidak dapat terlepas pada akuntansi sektor publik, karena pada dasarnya akuntansi sektor publik diharapkan dapat memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik dan sebagai alat perencanaan serta pengendalian bagi instansi sektor publik secara efektif dan efisien.

3. Prinsip dan Jenis Akuntabilitas

Dalam melaksanakan akuntabilitas pada organisasi pemerintah, prinsip-prinsip yang wajib diketahui sebagai berikut:

1. Pemimpin instansi dan seluruh pegawai berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan sesuai misi secara akuntabel.
2. Sistem yang dijalankan harus dapat menjamin sumber daya yang dipakai sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Mampu memperlihatkan tingkat tercapainya tujuan serta sasaran. Harus selaras untuk mencapai visi misi, hasil dan manfaat yang dirasakan”
4. Adil, objektif, transparan serta inovatif untuk menunjang perubahan

manajemen organisasi pemerintah dalam pembaharuan metodologi, pengakuan kinerja dan pelaporan akuntabilitas.

4. Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2021) akuntabilitas publik mempunyai beberapa indikator yaitu:

4. Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).
5. Prosedur pelaksanaan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
6. Pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan pertimbangan mengenai alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
7. Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah.

2.1.5 Responsibilitas

1. Pengertian Responsibilitas

Responsibilitas merupakan organisasi untuk mengatur sejauh mana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau prosedur yang telah diatur. Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan (Ramadhani *et al.*, 2020).

Responsibilitas ditunjukkan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggungjawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati. Jadi, prinsip tanggungjawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut. Dalam makna responsibilitas, jika tanggungjawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum (Devany *et al.*, 2020).

2. Jenis-jenis Responsibilitas

Terdapat dua jenis responsibilitas yaitu sebagai berikut:

a) Responsibilitas Objektif

Bentuk spesifik dari responsibilitas objektif menyangkut dua dimensi yaitu akuntabilitas dan kewajiban. Semua hal mengenai responsibilitas ini melibatkan pertanggungjawaban kepada seseorang atau badan kolektif, dan tanggungjawab untuk tugas-tugas tertentu, bawahan, dan terhadap pencapaian tujuan. Bermula pada akuntabilitas dan berakhir dengan kewajiban. Akuntabilitas dan kewajiban menyangkut responsibilitas kepada orang lain, hal ini adalah dimensi ganda dari responsibilitas objektif administrasi.

b) Responsibilitas subjektif

Responsibilitas subjektif dalam melaksanakan peran administrasi mencerminkan jenis etika profesi yang dikembangkan melalui pengalaman pribadi. Responsibilitas subjektif menyangkut

tingkat kesetiaan, nilai-nilai, dan juga karakteristik. Tanggung jawab subjektif berakar pada keyakinan yang menentukan dasar dalam bertindak yang kita sebut sebagai nilai-nilai, yang menjadi lebih atau kurangnya dijabarkan sebagai prinsip-prinsip (Syarifah, 2023)

3. Indikator Responsibilitas

Adapun indikator responsibilitas yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kejelasan tanggungjawab dan wewenang.
- 2) Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenang.
- 3) Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia).
- 4) Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan.
- 5) Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana.
- 6) Memiliki kebijakan mengenai metode kerja (BPKP, 2022)

2.1.6 Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan ataupun sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Mahsun, 2020).

Kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja menerangkan bahwa kinerja adalah hasil kerja atau pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan,

program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang telah tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.

Setelah suatu sistem pengelolaan keuangan berjalan, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tidak adanya penegakan hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan. Pengukuran kinerja sangat erat berkaitan dengan akuntabilitas. Untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang di dalam terdapat indikator kinerja dan target kinerja.

2.1.7 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Secara konseptual pengertian tata kelola pemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Apabila kualitas pemerintah daerah saat ini dan ke depan ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa inti dari kualitas pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan keuangannya.

Secara umum GGG merupakan pengamanaan atas hubungan timbal balik diantara elemen organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan kebijakan secara efisien dan efektif,

serta mengkomunikasikan secara terbuka dan memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (Zeyn, 2021)

Definisi GGG tersebut membawa konsekuensi munculnya dua batasan, yakni:

- a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat dan nilai- nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan.

Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki pemerintah dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seperti, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa.

2.1.8 Definisi Variabel

Transparansi dan akuntabilitas telah dianggap sebagai pilar utama

dalam pencegahan kecurangan di lingkungan pemerintahan. Teori ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan sumber daya publik. Konsep ini menjadi landasan bagi kebijakan dan praktik terkait pencegahan fraud di institusi pemerintah (Woods, 2021).

a. Transparansi

Transparansi adalah prinsip atau kondisi dimana informasi, keputusan, dan tindakan dari suatu organisasi atau individu disajikan secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pemerintahan, transparansi menunjukkan tingkat keterbukaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya publik, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya.

Secara khusus, transparansi dalam konteks pencegahan fraud di instansi pemerintah dapat berarti memberikan akses yang terbuka terhadap informasi keuangan, keputusan organisasi, proses pengadaan barang atau jasa, dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Hal ini memungkinkan untuk pengawasan yang lebih baik oleh publik, media, lembaga pengawas, serta mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya publik. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi, baik terkait dengan keuangan, kebijakan, maupun proses-proses yang terjadi di dalam suatu institusi pemerintah.

Transparansi dianggap sebagai salah satu elemen kunci dari *good*

governance atau tata kelola yang baik. Menurut teori ini, transparansi memainkan peran penting dalam memastikan integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang memadai dalam keputusan pemerintahan (Demamu, 2024). Dimana Informasi mengacu pada situasi di mana satu pihak dalam transaksi memiliki lebih banyak informasi dari pada pihak lainnya. Dalam konteks pemerintahan, dapat mengarah pada kurangnya transparansi yang menyebabkan ketidakpastian atau peluang terjadinya tindakan *fraud*. Transparansi merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Teori ini menekankan bahwa keterbukaan dalam proses dan keputusan pemerintahan akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan legitimasi institusi. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan erat dengan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil. Dalam konteks pencegahan *fraud*, memastikan adanya akuntabilitas berarti menetapkan sistem pengawasan yang efektif, memisahkan tugas dan tanggung jawab secara jelas, dan melakukan audit secara berkala untuk memeriksa kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku (Stevani, 2023)

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip atau kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan yang dilakukan oleh individu atau organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang dipengaruhi oleh tindakan tersebut. Dalam konteks pemerintahan,

akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab lembaga pemerintah untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan memberikan justifikasi atas tindakan, kebijakan, serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Akuntabilitas menekankan transparansi, integritas, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan, membuat keputusan, dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil, serta bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya publik dengan tepat (Bovens, 2020). Prinsip Akuntabilitas menguraikan prinsip-prinsip dan faktor yang merupakan elemen kunci dalam membangun sistem akuntabilitas yang efektif, termasuk klarifikasi tanggung jawab, pelaporan yang jelas, transparansi, serta mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif. Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memonitor dan mengawasi kinerja pemerintah. Akuntabilitas dapat diperkuat melalui keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan pemerintah serta mekanisme pemeriksaan dan tanggapan atas kinerja pemerintah.

c. *Fraud* atau penipuan

Fraud atau penipuan adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan manipulasi, tipu muslihat, atau kecurangan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara ilegal atau merugikan pihak lain.

Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti keuangan, bisnis, pemerintahan, maupun individu.

Tindakan *fraud* seringkali melibatkan menyembunyian informasi, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kepercayaan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara ilegal atau merugikan pihak lain. Pencegahan *fraud* atau penipuan dalam instansi pemerintah merupakan suatu hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah kasus penipuan atau kecurangan yang mungkin terjadi (Albrecht *et al.*, 2019).

Secara umum kecurangan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaiian tertentu. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Tidak ada aturan yang baku dalam mendefinisikan kecurangan yang meliputi tipu muslihat ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar. Menurut Ardianingsih (2018) kecurangan adalah penipuan yang menyertakan elemen- elemen berikut ini:

- a. Sebuah representasi
- b. Mengenai sesuatu yang bersifat material
- c. Sesuatu yang tidak benar
- d. Secara sengaja atau serampangan dilakukan

- e. Ditindaklanjuti oleh korban
- f. Korban menanggung kerugian

Dalam Islam, *fraud* merupakan salah satu sifat yang tercela dan harus di jauhi oleh para pelaku ekonomi dalam aktivitasnya. Ayat yang dapat menjadi landasan dalam larangan melakukan kecurangan adalah sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. 5. Pada suatu hari yang besar. 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.” (Q.S. Al- Muthaffifin ayat 1-6).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya terdapat ancaman dari Allah swt. terhadap orang-orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan, ukuran dan takaran. Dalam hal ini tindakan tersebut dapat berupa bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan biasa dijumpai dalam dunia kerja menurut *The Association of Certified*. Islam mendorong dan memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang berkata dan bersikap benar. Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Surah At-Taubah ayat 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah ayat 119).

Dalam ayat lain Allah swt. Menyatakan tidak memberi petunjuk bagi orang-orang pendusta.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.” (QS. Ghafir ayat 28).

Maka, berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa yakni, selalu berusaha menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Selain daripada itu, Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Karena jujur adalah tanda keimanan dan bukti ketakwaan. Oleh karena itu, tindakan kecurangan di atas tidak sejalan dengan ajaran Islam yang secara tegas melarang umatnya melakukan kecurangan, kebohongan, dusta, manipulasi, pencurian, ataupun tindakan buruk lainnya yang serupa, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan (Werastuti *et al.*, 2022)

Kantor pemerintahan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan

fungsi-fungsi administratif serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, terkadang risiko penipuan atau *fraud* dapat muncul dalam bentuk penggelapan dana, manipulasi data, atau penggunaan sumber daya secara tidak sah. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mencegah insiden-insiden semacam ini.

Langkah-langkah pencegahan *fraud* dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah dapat meliputi beberapa strategi, antara lain: Penerapan Kebijakan Transparansi: Menerapkan kebijakan yang memastikan keterbukaan informasi terkait keputusan, proses pengelolaan keuangan, dan kebijakan organisasi. Ini termasuk penyediaan akses publik yang lebih luas terhadap informasi *fraud* atau penipuan adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan manipulasi, tipu muslihat, atau kecurangan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara ilegal atau merugikan pihak lain. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti keuangan, bisnis, pemerintahan, maupun individu (Stevani, 2023).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keaslian, menghindari duplikasi, dan pengulangan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Auditya *et al.*, 2021) membuktikan bahwa variabel Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin

tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah di setiap OPD maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. 2. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Riswanto (2020) membuktikan bahwa hasil penelitian diketahui Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember; Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas yang dilakukan secara baik, sesuai, dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam prosesnya maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa transparansi yang diinformasikan kepada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan benar, sesuai dan seksama maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian (Novatiani *et al.*, 2019) membuktikan bahwa Hasil Transparansi di OPD Kabupaten Bandung Barat sudah baik, karena telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi yaitu adanya komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Akuntabilitas di OPD Kabupaten Bandung Barat sudah baik, karena sudah memenuhi kriteria 4 (empat) dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Kinerja Instansi Pemerintah di OPD Kabupaten Bandung Barat sudah baik

karena sudah memenuhi indikator-indikator kinerja instansi pemerintah yaitu adanya masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Penelitian (Umar *et al.*, 2019) yang membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155. Hasil penelitian ini akan memberikan dampak bahwa akuntabilitas akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh. Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor Inspektorat Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi (2020) membuktikan bahwa dalam penerapan transparansi masih belum dapat menerapkan bagaimana proses transparansi itu dijalankan. Penerapan prinsip akuntabilitas dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dinilai sudah memenuhi kriteria aturan undang-undang yang berlaku, tetapi dalam proses kegiatan masih didapati beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban. Dalam penerapan responsibilitas pengelolaan dana desa menilai pemerintah Desa Soko sudah baik dalam menerapkan prinsip responsibilitas.

Penelitian Qodariah (2020) membuktikan bahwa akuntabilitas anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang, sedangkan transparansi anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Transparansi Berpengaruh Terhadap Potensi Kecurangan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah untuk memberikan informasi seluas luasnya tentang segala kegiatan atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut (Garung *et al.*, 2020). Transparansi juga merupakan bentuk jaminan untuk masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi terkait pemerintahan. Potensi kecurangan dalam Pengelolaan anggaran dan keuangan adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efisien dan terbuka untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah maupun pusat (Mais *et al.*, 2020).

Melalui transparansi masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah yang tertuang dalam anggaran daerah maupun pusat. Juga melalui transparansi masyarakat di daerah atau pusat tersebut dapat memberikan feedback atau

outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kontrol yang besar dari masyarakat akan menyebabkan pengelola pemerintahan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik dan memihak kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2019) menyatakan bahwa transparansi memberikan masyarakat akses terhadap informasi terkait proses pemerintahan, seperti informasi kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai, guna meningkatkan kepercayaan dan respek masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya transparansi yang baik maka hal tersebut akan membuat agen menyajikan laporan keuangan yang baik dan jujur sehingga dengan ini dapat meminimalisir terjadinya *fraud* dan juga menjadi faktor pencegahan *fraud*.

Adapun penelitian yang dilakukan Auditya *et al.*, (2021) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan, maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat dirumuskan hipotesis yang akan diajukan adalah:

H₁ : Transparansi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan di lingkungan pemerintahan.

2.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Potensi Kecurangan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai pemegang amanah (*agent*) untuk dapat menyajikan, memberi pertanggungjawaban, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai kewenangan untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2020). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat yang mana masyarakat memiliki hak untuk meminta pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya (Faizzatus *et al.*, 2020).

Potensi kecurangan dalam Pengelolaan anggaran dan keuangan adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efisien serta terbuka untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah maupun pusat (Mais *et al.*, 2020). Dengan adanya prinsip akuntabilitas yang utama yaitu berhubungan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas program dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan yang telah ditetapkan (Mufidah *et al.*, 2019). Oleh karena ini diperlukan akuntabilitas agar

mengatasi perbedaan tujuan tersebut.

Akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah berlangsung setiap periodenya. Akuntabilitas tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam mengelola keuangan pemerintah itu sendiri, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintahan.

Penelitian dari Aulia *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa penyajian laporan realisasi alokasi dana pemerintahan, laporan pertanggungjawaban dan pelaporan tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk terus berupa menjadi salah satu faktor dalam pencegahan *fraud* karena principals memiliki hak meminta pertanggungjawaban dari agents. Sehingga pemerintahan akan memberikan pertanggungjawaban kinerja dengan hasil yang dapat memuaskan masyarakat.

Berdasarkan hal ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat *fraud* di lingkungan pemerintahan.

2.3.3 Responsibilitas Berpengaruh Terhadap Potensi Kecurangan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan (Ramadhani *et al.*, 2020). Potensi kecurangan dalam

Pengelolaan anggaran dan keuangan adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efisien serta terbuka untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah maupun pusat (Mais *et al.*, 2020).

Responsibilitas berarti sebuah pertanggungjawaban mengenai apa yang diperbuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Responsibilitas juga berarti sebagai suatu keharusan bagi seseorang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diwajibkan kepadanya. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan wewenang sesuai dengan ketentuan/prosedur yang ada. Pemerintah daerah dapat dikatakan responsible apabila dalam menjalankan pemerintahannya dengan baik, bertanggungjawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Fauzi (2020), menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana. Penelitian lain yang dilakukan oleh Adrian dan Soekarno (2021) juga menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana pemerintahan. Berdasarkan hal ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Responsibilitas berpengaruh positif terhadap tingkat *fraud* di lingkungan pemerintahan.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2020).

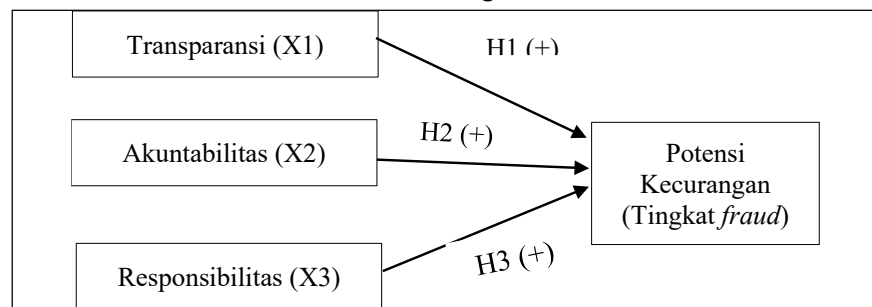
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan informasi bagi setiap orang atau pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlangsung, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang telah dicapai sebelumnya (Stevani, 2023).

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan dalam menjalankan organisasi, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja organisasi tersebut (Lukito, 2020).

Responsibilitas berarti sebuah pertanggungjawaban mengenai apa yang diperbuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Responsibilitas berarti sebagai suatu keharusan bagi seseorang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diwajibkan kepadanya. Pertanggungjawaban bermakna bahwa walaupun seseorang memiliki kebebasan, tetapi seseorang tersebut tidak bisa membebaskan diri dari hasil yang telah diperbuatnya dan dapat dituntut untuk menjalankan apa yang diwajibkan.

Potensi kecurangan dalam Pengelolaan anggaran dan keuangan adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efisien dan terbuka untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah maupun pusat (Mais *et al.*, 2020). Berdasarkan uraian sebelumnya, kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya berupa angka atau non angka yang di angkakan (data kualitatif yang di kuantitatifkan), lalu diolah dengan rumus statistik tertentu, dan diinterpretasikan dalam rangka menguji hipotesis yang telah disiapkan lebih dahulu, serta lazim bertujuan mencari sebab akibat sesuatu penelitian kuantitatif cenderung meneliti lebih dari satu variabel (Sugiyono, 2019).

Penelitian asosiatif (hubungan) merupakan penelitian yang menjelaskan kait berkait atau hubungan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak bisa memberikan bukti untuk menjelaskan variabel atau variabel- variabel yang mana yang merupakan penyebab dan yang mana merupakan akibat (Wagiran, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat *fraud* di lingkungan pemerintahan. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh antara kedua variabel tersebut maka penulis menggunakan metode asosiatif.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian *field research* merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan

(Jamil, 2021).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kuantan Singingi Riau dalam waktu 1 minggu.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan lingkungan generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti agar dapat dipahami sehingga dapat ditarik kesimpulannya (Putri *et al.*, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat pemerintahan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 61 orang.

Penelitian ini menggunakan jenis *nonprobability sampling*, yaitu dengan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel dan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih. Kriteria sampel yang digunakan adalah perangkat pemerintahan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sampel adalah bagian dari populasi yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu untuk kemudian dianggap menjadi wakil dari populasi yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Rosyidah & Fijra, 2021). Sampel yang digunakan sebanyak 61 orang

dari perangkat pemerintahan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi meliputi pejabat pemerintahan, bendahara, sekretaris, dan pegawai yang bertugas menjalankan fungsi akuntansi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan kuisisioner melalui *googleform*

3.4.1 Kuisisioner

Kuisisioner merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan diberikan kepada para responden untuk dapat menjawab pertanyaan yang diberikan secara objektif. Metode yang akan dilakukan yaitu *personally administered questionnaires* (kuesioner secara personal) yaitu peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya tentang kuisisioner dan dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden tersebut.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian terdapat hal yang dijadikan sebagai sasaran atau patokan yang disebut dengan variabel. Oleh karena itu, variabel disebut sebagai fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian untuk diteliti dan diukur. Operasional variabel merupakan variabel yang lengkap yang harus diamati dan dapat diukur guna mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2019).

a. Variabel Independen

Variabel independen selaku variabel penyebab adanya perubahan pada variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas di lingkungan pemerintahan.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang terpengaruhi dan disebut sebagai variabel yang jadi akibat dari adanya variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pengaruh tingkat fraud di lingkungan pemerintahan.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator
Transparansi (X1)	Transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintah untuk memberikan informasi seluas luasnya tentang segala kegiatan atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut.	1. Penyediaan dan akses informasi jelas tentang perencanaan prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban 2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat 3. Keterbukaam informasi melalui dokumen pengelolaan dana daerah

		(Bawono et al., 2020)
Akuntabilitas (X2)	<p>Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai pemegang amanah (agent) untuk dapat menyajikan, memberi pertanggung jawaban, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang mempunyai kewenangan untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2020)</p>	<p>1. Prosedur atau pedoman perencanaan</p> <p>2. Pelaksanaan</p> <p>3. Penatausahaan</p> <p>4. Pelaporan dan pertanggungjawaban</p> <p>(Islamiyah et al., 2020)</p>

Responsibilitas (X3)	<p>Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan (Ramadhani <i>et al.</i>, 2020).</p>	<p>1. Kejelasan tanggungjawab dan wewenang.</p> <p>2. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenang.</p> <p>3. Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia).</p> <p>4. Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan.</p> <p>5. Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana.</p> <p>6. Memiliki kebijakan mengenai metode kerja (BPKP, 2022)</p>
-------------------------	---	--

Potensi Kecurangan (Y)	Potensi kecurangan dalam Pengelolaan anggaran dan keuangan adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efisien dan terbuka untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah maupun pusat	1. Budaya kejujuran 2. Penerapan sistem sesuai dengan hasil yang diperoleh 3. Penerapan pengelolaan keuangan dengan mencegah kecurangan (Alfaruqi, 2020)
------------------------------	--	--

3.6 Skala Penilaian

Skala penilaian pada penelitian ini adalah skala interval. Skala interval pada umumnya digunakan untuk mengukur objek penelitian kuantitatif yang jelas serta terukur secara baik. Pada skala interval ini mengukur opini atau persepsi responden berdasarkan 4 kategori dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Skala interval yang digunakan dalam mengklasifikasikan penilaian dalam kuisioner terdiri dari :

- a. 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- b. 2 = Tidak Setuju (TS)
- c. 3 = Netral (N)
- d. 4 = Setuju (S)
- e. 5 = Sangat Setuju (SS)

3.7 Uji Instrumental

Uji Instrumental ini terdiri dari pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel pada setiap pertanyaan sebagai tolak ukur dalam kuisioner.

3.7.1 Uji Validitas

Uji Validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner yang telah dibuat. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas pada penelitian ini menggunakan Corrected Product Moment yaitu :

- a. Jika nilai r hitung $> r$ tabel, bernilai positif maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid.
- b. Jika nilai r hitung $< r$ tabel, bernilai negatif maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menghilangkan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam analisis regresi sehingga hasil yang akan diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati kenyataan. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Diamonalisa *et al.*, 2022).

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas memiliki tujuan agar dapat menguji apakah didalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Model regresi dikatakan baik apabila datanya dapat berdistribusi normal bahkan mampu mendekati normal. Analisis statistik adalah sebagai alat statistik yang sering dipergunakan dalam menguji normalitas residual seperti uji statistik non-parameter K-S (Kolmogorov- Smirnov). Jika nilai probabilitas dinyatakan signifikan atau lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data tersebut dikatakan terdistribusi dengan normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas dinyatakan signifikan atau lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda pada penelitian ini. Jika ada korelasi 68 yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap

variabel terikatnya menjadi terganggu. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Varian Inflation Factor). Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka model terbebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas “memiliki tujuan agar dapat menguji apakah dalam model regresi mengalami ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan- pengamatan lainnya. Apabila varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain masih sama, maka disebut homoskedastisitas. Homoskedastisitas dapat dilakukn dengan uji Glejser maka boleh dikatakan sebagai model regresi yang baik. Cara yang dilakukan dengan menggunakan uji Glejser adalah meregres semua nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, begitupun sebaliknya (Basuki & Prawoto, 2020).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi diantara anggota atau data observasi yang terletak berderetan. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- 2) Jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada

terautokorelasi

- 3) Jika DW di atas +2 berarti ada autokorelasi positif.

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Terkait pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi berganda, apabila peneliti bermaksud memberitahukan suatu keadaan variabel dependen dan dipengaruhi oleh dua variabel independen atau lebih sebagai faktor predictor. Dalam penelitian ini penggunaan regresi berganda sebagai pengujian hipotesisnya sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya, juga digunakan agar dapat mengetahui keakuratan hubungan antara tingkat fraud di lingkungan pemerintahan sebagai variabel yang mempengaruhi (variabel independen) dengan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Fraud

α = Konstanta (Tetap)

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi dari variabel independen $X_1 = \text{Transparansi}$

$X_2 = \text{Akuntabilitas}$ $X_3 = \text{Responsibilitas}$

e = Error (Kesalahan Pengganggu) (Basuki & Prawoto, 2020)

3.6.3 Pengujian Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud

mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R – Squared. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square (R^2) pada tabel Model Summary. Menurut Ghozali nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, Sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel – variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.6.4 Pengujian Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi.

Menurut (Roflin *et al.*, 2022) koefisien korelasi (r) menunjukan derajat korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi harus terdapat dalam batas-batas -1 hingga +1 ($-1 < r \leq$

+1) yang menghasilkan beberapa kemungkinan, antara lain sebagai berikut:

1. Tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif dalam variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai X akan diikuti dengan kenaikan dan penurunan Y. Jika $r = +1$ atau mendekati 1 maka menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel-variabel yang diuji sangat kuat.
2. Tanda negatif menunjukkan adanya korelasi negatif antara variabel-variabel yang diuji, berarti setiap kenaikan nilai-nilai X akan diikuti dengan penurunan nilai Y dan sebaliknya. Jika $r = -1$ atau mendekati -1 maka menunjukkan adanya pengaruh negatif dan korelasi variabel-variabel yang diuji lemah.
3. Jika $r = 0$ atau mendekati 0 maka menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada korelasi sama sekali antara variabel-variabel yang diteliti dan diuji.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (hipotesis alternative

H_a atau H_1) merupakan hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang memiliki hubungan (relevan) dengan masalah penelitian sesuai dengan fakta serta dukungan data yang nyata adanya dilapangan. Secara statistic hipotesis dikatakan sebagai pernyataan dari keadaan populasi (parameter) yang akan di uji kebenarannya sesuai data yang diperoleh dari sampel penelitian. Pengujian hipotesis didalam penelitian ini menggunakan Uji t (secara parsial)

a. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik pada dasarnya menggambarkan antara pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual pada saat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Zaenuddin (2020), kriteria mengenai penolakan atau penerimaan hipotesis dapat ditentukan sebagai berikut:

- 1) Uji statistik t hitung
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak
- 3) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima
- 4) Berdasarkan signifikansi
- 5) Jika $Sig. < \alpha$, maka H_0 diterima
- 6) Jika $Sig. > \alpha$, maka H_0 ditolak

b. Uji F atau Uji Ketepatan Model (*Goodness of Fit Models*)

Uji *Goodness of Fit Models* digunakan untuk menguji kelayakan model dalam penelitian. Uji F signifikan maka model dikatakan layak untuk diteliti, atau model *fit*. Model dikatakan layak apabila data *fit*

(cocok) dengan persamaan regresi. *Goodness of Fit Models* yang dapat dilihat dari nilai uji F *analysis of variance* (ANOVA). Pada pengujian ini kriteria pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara sebagai berikut (Basuki & Prawoto, 2020) :

1. Jika nilai $p\text{-value} < \text{tingkat signifikansi (Sig} < 0,05)$, maka uji F signifikan.
2. Jika nilai $p\text{-value} > \text{tingkat signifikansi (Sig} > 0,05)$, maka uji F tidak signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu melalui penyebaran kuesioner *google form* kepada para responden penelitian yaitu pegawai yang berada dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 28 April– 02 Mei 2025. Jumlah data yang diisi dan dikembalikan dengan sampel sebanyak 61 responden atau jumlah keseluruhan pegawai dilingkungan BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi. Data yang telah diterima dilakukan pengolahan lebih lanjut oleh peneliti. Data sejumlah 61 responden dengan bidang yang berbeda-beda terdiri di lingkungan BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi . Data penelitian dapat di deskripsikan dalam bentuk tabulasi sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Adapun karakteristik responden dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan terakhir, lama bekerja dan jabatan.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin untuk melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Kuantan

Singingi yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, jumlah dan persentase berikut :

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Pria	32	52.5
Wanita	29	47.5
Total	61	100.0

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin responden pria berjumlah 32 orang atau sebesar 52.5% dari keseluruhan jumlah responden dan wanita sebanyak 29 orang atau sebesar 47.5 % dari keseluruhan jumlah responden.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Kelompok usia menggambarkan kategori yakni 21 – 30 tahun, 31 – 40 tahun, 41 – 50 tahun dan > 50 tahun. Jumlah dan persentase pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia	Frekuensi (n)	Persentase (%)
21 – 30 tahun	19	31.1
31 – 40 tahun	22	36.1
41 – 50 tahun	12	19.7
> 50 tahun	8	13.1
Total	61	100.0

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kelompok rentang usia 31 – 40 tahun menjadi kelompok usia dengan responden terbanyak yaitu sebanyak 22 orang atau sekitar 36.1% dari jumlah keseluruhan responden, kelompok usia >50 tahun menjadi kelompok usia paling rendah yaitu sebanyak 8 orang atau 13.1% dari jumlah keseluruhan responden.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir pegawai dengan tingkatan SMA, Diploma, S1, S2 dan S3 Jumlah dan persentase pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir

Pendidikan terakhir	Frekuensi (n)	Persentase (%)
SMA	4	6.6
Diploma	11	18.0
S1	40	65.6
S2	5	8.2
S3	1	1.6
Total	61	100.0

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir pegawai sebagian besar adalah S1 (Sarjana) sebanyak 40 orang atau 65.6%, sedangkan pendidikan terakhir sebagian kecil adalah S3 sebanyak 1 orang (1.6%) dari keseluruhan jumlah responden.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama bekerja pegawai dikelompok dari 1-5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun, 16-20 tahun dan >20 tahun. Jumlah dan persentase pegawai di lingkungan BPKAD

Kabupaten berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Pendidikan terakhir	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1 - 5 tahun	19	31.1
6 - 10 tahun	22	36.1
11 - 15 tahun	10	16.4
16 - 20 tahun	7	11.5
> 20 tahun	3	4.9
Total	61	100.0

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa lama bekerja pegawai di lingkungan BPKAD sebagian besar adalah 6 – 10 tahun sebanyak 22 orang atau 36.1% sedangkan pegawai yang bekerja dengan >20 tahun paling sedikit sebanyak 3 orang (4.9%).

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan pegawai dikelompok dari kepala dinas, kasubbag, staff, dan fungsional. Jumlah dan persentase pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten berdasarkan jabatan pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kepala Dinas BPKAD	1	1.6
Kasubbag/Kasubbag Umum	6	9.8
Staff	42	68.9
Fungsional	12	19.7
Total	61	100.0

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jabatan pegawai di lingkungan BPKAD

sebagian besar sebagai staff sebanyak 42 orang atau 68.9% dari jumlah keseluruhan responden.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Pada analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui persebaran data atau demografi data yang dilihat dari 4 bagian diantaranya nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Berikut hasil analisis yang diperoleh dari penelitian :

Tabel 4. 6 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Transparansi (X1)	28.00	50.00	42.0656	6.08788
Akuntabilitas (X2)	30.00	50.00	42.5902	5.58682
Responsibilitas (X3)	28.00	50.00	40.7213	6.67116
Tingkat Potensi Kecurangan (Y)	10.00	35.00	18.9672	6.73787

Tabel 4.6 di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Variabel transparansi (X1) diketahui nilai minimum dan maksimum sebesar 28 dan 50 Nilai rata-rata yang didapat dari variabel transparansi sebesar 42.06 dengan standar deviasi 6.087
2. Variabel akuntabilitas (X2) diketahui nilai minimum dan maksimum sebesar 30 dan 50 Nilai rata-rata yang didapat dari variabel akuntabilitas sebesar 42.59 dengan standar deviasi 5.586
3. Variabel responsibilitas (X3) diketahui nilai minimum dan maksimum sebesar 28 dan 50 Nilai rata-rata yang didapat dari variabel responsibilitas sebesar 40.72 dengan standar deviasi 6.671

4. Variabel potensi kecurangan (*fraud*) diketahui nilai minimum dan maksimum sebesar 10 dan 35. Nilai rata-rata yang didapat dari variabel potensi kecurangan (*fraud*) sebesar 18.96 dengan standar deviasi 6.737.

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam menentukan valid atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikan koefisien pada taraf signifikan 5% dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26.0. untuk cara lain melihat suatu item dianggap valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Uji Validitas		
		koefisien	Kriteria	Ket
Transparansi (X1)	X1.1	0.683	0.3961	Valid
	X1.2	0.837	0.3961	Valid
	X1.3	0.603	0.3961	Valid
	X1.4	0.574	0.3961	Valid
	X1.5	0.823	0.3961	Valid
	X1.6	0.648	0.3961	Valid
	X1.7	0.803	0.3961	Valid
	X1.8	0.712	0.3961	Valid
	X1.9	0.57	0.3961	Valid
	X1.10	0.687	0.3961	Valid
Akuntabilitas (X2)	X2.1	0.802	0.3961	Valid
	X2.2	0.881	0.3961	Valid
	X2.3	0.723	0.3961	Valid
	X2.4	0.764	0.3961	Valid
	X2.5	0.853	0.3961	Valid
	X2.6	0.896	0.3961	Valid
	X2.7	0.693	0.3961	Valid
	X2.8	0.808	0.3961	Valid

	X2.9	0.831	0.3961	Valid
	X2.10	0.674	0.3961	Valid
Responsibilitas (X3)	X3.1	0.907	0.3961	Valid
	X3.2	0.748	0.3961	Valid
	X3.3	0.879	0.3961	Valid
	X3.4	0.735	0.3961	Valid
	X3.5	0.932	0.3961	Valid
	X3.6	0.799	0.3961	Valid
	X3.7	0.909	0.3961	Valid
	X3.8	0.907	0.3961	Valid
	X3.9	0.801	0.3961	Valid
	X3.10	0.866	0.3961	Valid
Tingkat Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)	Y1	0.72	0.3961	Valid
	Y2	0.831	0.3961	Valid
	Y3	0.849	0.3961	Valid
	Y4	0.592	0.3961	Valid
	Y5	0.687	0.3961	Valid
	Y6	0.755	0.3961	Valid
	Y7	0.563	0.3961	Valid
	Y8	0.597	0.3961	Valid
	Y9	0.837	0.3961	Valid
	Y10	0.581	0.3961	Valid

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji untuk mengukur apakah data reliabel atau tidak pada suatu kuesioner dengan mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten dan dapat dipercaya. Hasil pengukuran dengan melihat nilai *cronbach alpha* $> 0,6$ maka suatu item pertanyaan dapat dikatakan reliabel. Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas penelitian ini :

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Transparansi (X1)	0.878	$>0,6$	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0.929	$>0,6$	Reliabel
Responsibilitas (X3)	0.957	$>0,6$	Reliabel
Tingkat Potensi Kecurangan (Y)	0.853	$>0,6$	Reliabel

4.4 Uji Asumsi Klasik

Model yang dihasilkan sebelum digunakan untuk pengujian hipotesis, maka dilakukan pengujian dengan uji asumsi klasik untuk mengetahui data suatu penelitian layak digunakan. Berikut hasil dari hasil uji asumsi klasik yaitu :

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov yaitu apabila nilai signifikansi $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal. Berikut merupakan hasil uji normalitas.

Tabel 4. 9 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
n		61
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.47312640
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.098
	Negative	-.058
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Tabel 4.9 hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada output SPSS

versi 26 menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau memenuhi syarat asumsi normalitas.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Pada uji multikolinearitas, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika nilai tolerance > 0.1 dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10 , maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berikut merupakan hasil uji multikolineritas dengan metode VIF :

Tabel 4. 10 Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Transparansi (X1)	.869	1.150
Akuntabilitas (X2)	.991	1.010
Responsibilitas (X3)	.862	1.160

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 4.10 di atas bahwa semua variabel tidak terkena multikolinieritas karena nilai dari masing-masing variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas, dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi yaitu apabila nilai sig. $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan berlaku sebaliknya.

Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode glejser :

Tabel 4. 11 Uji Heterokedastisitas

Variabel	<i>P-value</i>
Transparansi (X1)	0.107
Akuntabilitas (X2)	0.572

Responsibilitas (X3) 0.192

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa semua variabel tidak memiliki masalah heteroskedastisitas karena setiap variabel memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara data observasi yang terletak berderetan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 12 Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	<i>Durbin-Watson</i>
Transparansi (X1)	1.950
Akuntabilitas (X2)	
Responsibilitas (X3)	

Tabel 4.12 di atas diketahui nilai durbin-watson sebesar 1.950 berada diantara -2 hingga 2 maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya autokorelasi.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan analisis dengan program SPSS version 26.0 for Windows diperoleh hasil regresi berganda terangkum pada tabel berikut :

Tabel 4. 13 Persamaan Regresi Linier Berganda

Variabel	Tipe	Prediksi	T-stat	Koefisien	<i>Sig.</i>	Ket
----------	------	----------	--------	-----------	-------------	-----

variabel						
(Constant)			7.435	58.085	0.000	Didukung
Transparansi	TS	+	2.490	0.318	0.016	Didukung
Akuntabilitas	AK	+	2.061	0.269	0.044	Didukung
Responsibilitas	RP	+	3.000	0.351	0.004	Didukung
Adj R ² : 0.605						
F : 9.796						
Sig : 0.000						

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada Tabel 4.13 dapat dilihat antara variabel independen terhadap variabel terikat tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut ;

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Potensi Kecurangan (Y) = 58.805 + 0.318 (Transparansi) + 0.269 (Akuntabilitas) + 0.351 (Responsibilitas)

Berdasarkan hasil analisis data dan persamaan regresi tersebut, dapat disimpulkan mengenai beberapa hal berikut ini :

1. Nilai koefisien regresi constanta sebesar 58.805 artinya transparansi (X1), akuntabilitas (X) dan resposibilitas (X3) bernilai 0 maka (Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)) nilainya positif sebesar 58.805.
2. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai Sig (t) untuk pengaruh transparansi adalah sebesar $0,016 < \alpha(0,05)$ dengan nilai T hitung sebesar $2.490 > T \text{ tabel } (1.99)$ dan nilai koefisien regresi transparansi sebesar 0.318 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel transparansi maka

(Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)) akan mengalami peningkatan sebesar 0,318 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap atau tidak berubah selama masa pengamatan. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan (*fraud*) dilingkungan pemerintahan daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)

3. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai Sig (t) untuk pengaruh akuntabilitas adalah sebesar $0,044 < \alpha(0,05)$ dengan nilai T hitung sebesar $2.061 > T \text{ tabel } (1.99)$ dan nilai koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0.269 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel akuntabilitas maka (Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)) akan mengalami peningkatan sebesar 0.269 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap atau tidak berubah selama masa pengamatan. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan (*fraud*) dilingkungan pemerintahan daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)
4. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai Sig (t) untuk pengaruh responsibilitas adalah sebesar $0,004 < \alpha(0,05)$ dengan nilai T hitung sebesar $3.000 > T \text{ tabel } (1.99)$ dan nilai koefisien regresi responsibilitas sebesar 0,351 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel responsibilitas maka (Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)) akan mengalami peningkatan sebesar 0.351 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap atau tidak berubah selama masa pengamatan. Maka dapat disimpulkan bahwa

responsibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan (*fraud*) dilingkungan pemerintahan daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi).

Berdasarkan hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai F hitung sebesar $9.796 > F \text{ tabel } (2.77)$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha(0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (transparansi (X1), akuntabilitas (X) dan resposibilitas (X3) terhadap variabel dependen (Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)) adalah layak untuk di teliti. Nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 0.605 atau 60.5%. Hal ini dapat diartikan bahwa (transparansi (X1), akuntabilitas (X) dan resposibilitas (X3) menyumbang pengaruh ke variabel dependen (Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)) sebesar 60.5% dan sisanya sebesar 39.5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Potensi Kecurangan (*Fraud*) Dilingkungan Pemerintahan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)

Hasil penelitian diperoleh dari transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dilingkungan Pemerintahan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). Yang berarti semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin

besar potensi fraud terdeteksi dan diminimalisir. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al., (2023) yang menyatakan transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Penelitian lain dilakukan oleh Wildayanti (2023) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan keuangan.

Transparansi berarti mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan laporan pada pihak luar atau organisasi mandiri seperti legislator, auditor, publik secara terbuka, dan kemudian di publikasikan. Transparansi diperlukan agar adanya keterbukaan kepada masyarakat untuk pelaporan pengelolaan dana pemerintahan. Transparansi juga berperan agar ada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan dana. Transparansi berjalan dengan baik terhadap pengelolaan dana desa karena adanya informasi yang dapat diakses serta komunikasi yang baik sehingga pengelolaan dana desa dianggap transparan. Dengan adanya transparansi yang baik maka hal tersebut akan membuat agents menyajikan laporan keuangan yang baik dan jujur sehingga dengan ini dapat meminimalisir terjadinya fraud dan juga menjadi faktor pencegahan fraud.

Transparansi merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan transparansi, pemerintah dapat mengurangi risiko fraud, meningkatkan akuntabilitas, mendorong partisipasi masyarakat, membangun

kepercayaan publik, dan pada akhirnya, mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Transparansi merupakan bentuk jaminan untuk masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi terkait pemerintah (Mais & Palindri, 2020).

Penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh Yuliyana (2024) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun, ada penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Andayani., et al (2023) bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Potensi Kecurangan (*Fraud*) Dilingkungan Pemerintahan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)

Hasil penelitian diperoleh dari akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dilingkungan Pemerintahan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam masyarakat yang akuntabilitasnya tinggi, upaya untuk mengurangi kecurangan lebih mungkin berhasil. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipahami sebagai tanggung jawab pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil-hasilnya. Konsisten dengan temuan sebelumnya, penelitian ini mendukung temuan Sariwati dan Sumadi. Hal ini sejalan dengan temuan Putri (2024) bahwa akuntabilitas berdampak pada pengurangan kecurangan

(fraud) dalam pengelolaan dana pemerintah kota, dan dengan (2022) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berdampak positif terhadap pengurangan penyelewengan (fraud) dalam pengelolaan dana pemerintah kota.

Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban seseorang yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak tertentu, dan pihak tertentu tersebut mendapat kesempatan dan diberi kepercayaan/amanah untuk mencapai tujuan. Dimana dalam pencapaian tujuan tersebut, nantinya akan ada suatu keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi sistem akuntabilitas yang kuat dapat mengurangi risiko dan potensi terjadinya kecurangan dalam berbagai bidang, termasuk akuntansi dan pengelolaan keuangan (Muschlihah, 2020).

Kondisi akuntabilitas yang bersifat formalitas di lingkungan pemerintahan daerah. Akuntabilitas hanya dijalankan untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa pengawasan yang efektif, sehingga tidak mampu menekan tindakan fraud. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dituntut, maka pelaku fraud menjadi lebih berhati-hati dan menyembunyikan tindakannya, sehingga tindakan fraud tetap terjadi namun lebih sulit dideteksi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Dayanti *et al.*, 2021) menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Riesma (2022) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kecenderungan akuntansi keuangan di pemerintahan Kota Gresik. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Meylina & Artika, 2023) menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana.

3. Pengaruh Responsibilitas Terhadap Potensi Kecurangan (*Fraud*) Dilingkungan Pemerintahan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)

Hasil penelitian diperoleh dari responsibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dilingkungan Pemerintahan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). Hal ini menunjukkan responsibilitas memiliki peran penting dalam mencegah kecurangan. Semakin tinggi tingkat responsibilitas, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan, karena pemerintah akan lebih menyadari pentingnya berintegritas dan menghindari perilaku yang merugikan. Penelitian ini di dukung oleh Fathin & Ayu (2023) bahwa responsibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kecurangan. Penelitian lain juga tidak sejalan dilakukan oleh Tukma (2023) bahwa pengungkapan respon berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Responsibilitas berperan penting dalam menciptakan budaya organisasi yang lebih jujur dan etis, sehingga mengurangi risiko kecurangan di berbagai bidang, termasuk keuangan. Responsibilitas adalah

sikap yang mencerminkan bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.

Responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksana kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila sudah tepat manajemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Responsibilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima. Semakin tinggi rasa tanggung jawab (responsibilitas) aparat pemerintah daerah, maka semakin rendah potensi terjadinya kecurangan atau *fraud*. Hal ini karena individu yang merasa bertanggung jawab cenderung menjunjung etika dan menjauhi tindakan yang merugikan publik.

Adapun penelitian ini tidak sejalan dengan Asham (2023) bahwa responsibilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial fraud*. Penelitian lain oleh Gen (2021) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecurangan. Hal ini karena meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap aturan dan etika, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Hal ini terjadi karena individu yang bertanggung jawab akan lebih berhati-hati dalam tindakan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain atau

organisasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintahan daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin besar potensi pencegahan kecurangan terdeteksi dan diminimalisir.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintahan daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka semakin besar potensi pencegahan kecurangan terdeteksi dan diminimalisir.
3. Responsibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintahan daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). Hal ini berarti semakin tinggi responsibilitas maka semakin besar potensi pencegahan kecurangan terdeteksi dan diminimalisir.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian yang diperoleh. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Data yang didapat kurang maksimal karena jumlah pegawai di lingkungan pemerintahan daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah pegawai sedikit.
2. Tidak adanya akses informasi yang lengkap mengenai responden penelitian secara menyeluruh.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini mungkin tidak bisa digeneralisasi ke seluruh instansi pemerintah daerah lainnya yang memiliki karakteristik, sistem pengelolaan, dan budaya kerja yang berbeda.
4. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode kuesioner online dalam waktu yang terbatas, sehingga terdapat kemungkinan bias respon dari partisipan, baik karena ketidaktelitian dalam pengisian maupun kurangnya pemahaman terhadap pernyataan dalam kuesioner

5.3 Saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), diharapkan sistem pengawasan internalnya dengan memperhatikan kebijakan aspek pemerintahan daerah.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan memperkuat aspek akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas secara menyeluruh dengan memastikan adanya pengawasan internal dan eksternal yang efektif.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan adanya penambahan variabel penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih luas khususnya yang mengenai pengaruh terhadap potensi pencegahan *fraud* seperti variabel tekanan, peluang, kompetensi dan budaya organisasi. Dari penelitian ini diperoleh bukti bahwa teori agensi dapat dijadikan teori dasar untuk menguji faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintahan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan ditambahkan teori lain yang cocok untuk mendapatkan faktor-faktor lainnya yang lebih luas untuk menguji potensi kecurangan di lingkungan pemerintahan.
4. Dari penelitian ini diperoleh bukti bahwa teori agensi dapat dijadikan teori dasar untuk menguji faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintahan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan ditambahkan teori lain yang cocok untuk mendapatkan faktor-faktor lainnya yang lebih luas untuk menguji potensi kecurangan di lingkungan pemerintahan.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian agar tidak terbatas pada satu instansi saja, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih representatif dan dapat digeneralisasikan. Penelitian lanjutan dapat

dilakukan pada instansi pemerintah daerah lainnya seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di kabupaten atau kota lainnya. Dengan memperluas cakupan objek, diharapkan penelitian ke depan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashma', F., U., & Laksmi, A., C. (2023). *Corporate Social Responsibility dan Stabilitas Keuangan terhadap Financial Fraud: Peran Moderasi dari Kualitas Audit*. *Journal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 134-152.
- Al-ahdal, W. M., Alsamhi, M. H., Tabash, M. I., & Farhan, N. H. S. (2020). The impact of corporate governance on financial performance of Indian and GCC listed firms: An empirical investigation. *Research in International Business and Finance*, 51 (August 2019), 101083. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.10108>.
- Amin, N. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. *Iqtishaduna*, 8(2) 80–91. <https://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64>.
- Apriyanti, R. (2023). The Influence Of Employee Professionalism And Competence In Improving The Quality Of Employee Service One Stop Integrated Services, Kembangan District, West Jakarta Administrative City. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 1–11. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3246>.
- Arifani, C., Agustinus Salle, yahoocoid, & Rante, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Da Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris Pada Pemerimtah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 68–82.
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). *The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance*. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>.
- Abdullah, S., & Halim, A. (2020). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *SSRN Electronic Journal*, 2(2), 17–32. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2168571>.

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2019). *Fraud examination* (6 ed.). Cengage.
- Andrianto, N. (2007). *Good e-government: transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Bayumedia.
- Ardianingsih, A. (2018). *Audit Laporan Keuangan*. Bumi Aksara.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>.
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–42. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>.
- Bustani, Khaddafi, M., & Ilham, R. N. (2022). Regional Financial Management System of Regency/City Regional Original Income in Aceh Province Period Year 2021-2020. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 2(3), 459–468. <http://radjapublika.com/index.php/IJERLAS/article/view/277>.
- Bank, W. (2020). *World Development Report 2020 : trading for development in the age of global value chains*. World Bank.
- Bastian, I. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2021). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis (dilengkapi aplikasi SPSS dan eviews)*. Raja Grafindo Persada.
- Bovens, M. (2020). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>.

- Baten, M. A., Polk, T. K., Ruhland, G., Rose, J., & Peterson, S. (2021). A Lesson In The Relationship Between Corporate Social Responsibility (CSR) And Corporate Financial Fraud. *Review of Business, Accounting, & Finance*, 1(5), 415-435.
<https://fortunepublishing.org/index.php/rbaf/article/view/68>.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2001). *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Diamonalisa, Nurhayati, N., & Rahman, D. (2022). *Mengolah Data Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Literasi Nusantara Abadi.
- Ellwood, S. (1993). Parish and town councils: Financial accountability and management. *Local Government Studies*, 19(3), 368–386.
<https://doi.org/10.1080/03003939308433687>.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gen, W., Yustina, A. I., Hajanirina, A., & Reyes, M. A. (2022). Corporate social responsibility and corporate financial fraud: evidence from China. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 6(1), 38-51.
<https://doi.org/10.33021/jaaf.v6i1.3614>.
- Haikal, M. F., & Mauliana, D. D. (2022). Public Service Accountability And Transparency (Case Study Of E-Ktp Service In Tallo District Office Makassar City. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1).
- Halim, A. (2021). *Bunga rampai manajemen keuangan daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Ihyaul, U., & Sofyani, H. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Aditya Media.
- Indriani, N., & Rohman, A. (2022). Fraud Triangle dan Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Model Beneish M-Score. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 20(1), 85–104. <https://doi.org/10.24167/jab.v20i1.4367>.

- Isaac, S. A. (2022). The impact of audit quality on earnings management: Evidence from France. *Journal of Accounting and Taxation*, 14(1), 52–63. <https://doi.org/10.5897/jat2021.0514>.
- Jamil, J. (2021). *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah, Lengkap dengan Panduan Wajib Untuk Semua Mahasiswa*. CV. Azka Pustaka.
- Krina, L. L. (2023). *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lukito, P. K. (2020). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan*. Grasindo.
- Li, X., Kim, J.-B., Wu, H., & Yu, Y. (2019). Corporate Social Responsibility and Financial Fraud: The Moderating Effects of Governance and Religiosity. *Journal of Business Ethics*, 170(3), 557–576. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04378-3>.
- Liao, L., Chen, G., & Zheng, D. (2019). Corporate social responsibility and financial fraud: evidence from China. *Accounting & Finance*, 59(5), 3133–3169. <https://doi.org/10.1111/acfi.12572>.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (1 ed.). BPFE.
- Mardiasmo, M. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1–17.
- Mardiasmo, M. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>.

- Putri, R., Rosmalia, D., Fahmi, F., Sihombing, P. R., Siregar, S., Suardika, I. K., Wahyu Dwi Warsitasari, W. D., Akbar, H., Rismayani, R., & Zahari, M. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Qodariah, L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersiha Dan Keindahan Kota Palembang.
- Riswantini, R. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Kasus Di Desa Caringin Wetan, Desa Caringin Kulon, Dan Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi). <https://eprints.ummi.ac.id/274/>.
- Riswanto, N. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–7.
- Roflin, E., Rohana, R., & Riana, F. (2022). *Analisis Korelasi dan Regresi*. Penerbit NEM.
- Rosyidah, M., & Fijra, R. (2021). *Metode Penelitian*. Deepublish.
- Schick, A. (2020). Reflections on two decades of public financial management reforms. Dalam M. Cangiano, T. Curristine, & M. Lazare (Ed.), *Public Financial Management and Its Emerging Architecture* (hlm. 21–77). International Monetary Fund.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa : Panduan tata kelola keuangan desa*. Pustaka Baru.
- Ultafiah, W. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/443/>.

Umar, Z., Syawalina, C. F., & Khairunnisa, K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Kolegial*, 6(2). <https://doi.org/10.31219/osf.io/9yzk>.

Wagiran, W. (2013). *Metodologi penelitian pendidikan : teori dan implementasi* Deepublish.

Warren, M. E. (2017). A problem-based approach to democratic theory. *American Political Science Review*, 111(1), 39–53. <https://doi.org/10.1017/S0003055416000605>.

Werastuti, D. N. S., Hantono, H., Yusran, M., Barus, I. N. E., R, B., Surianto, S., Thaha, S., Dura, J., Murniati, S., Soedarwati, E., Rotinsulu, C. N. M., Moridu, I., Ayuandiani, W., & Sharon, St. S. (2022). *Analisa Laporan Keuangan*. CV. Media Sains Indonesia.

Winarno, W. (2011). Pengembangan sikap entrepreneurship & intrapreneurship : Korelasinya dengan budaya perusahaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi berprestasi di perusahaan. Indeks.

Zaenuddin, M. (2020). Statistik Terapan Untuk Ekonomi Dan Bisnis (Teori Dan Praktik Komputer Dengan Menggunakan Spss & Excel). Deepublish.

Zelmiyanti, R. (2020). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(01), 71694.

Zeyn, E. (2021). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 21–36. <https://doi.org/10.22219/jrak.v1i1.497>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengantar Penelitian



**FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA**

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

Nomor : ____/DEK/10/Div.SDM/____/_____
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami:

Nama : LATIFA AZZAHRA FITRI
NIM : 21312103
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl.Ade Irma Suryani RT 1 RW 2 Kel.Sei Jering Kab.Kuantan Singingi Prov.Riau

Bermaksud mohon keterangan/data pada instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul:

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN RESPONSIBILITAS TERHADAP
POTENSI KECURANGAN (FRAUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi)**

Dosen Pembimbing : Prof. Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 April 2025

Dekan,



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2 Berkas Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsp.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 090/DPMPPTSP-PTSP/1.04.02.02/2025

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Nomor:547/DEK/10/Div.URT/IV/2025 Tanggal 28 APRIL 2025.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : LATIFA AZZAHRA FITRI
NIM : 21312103
Jurusan : AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : SUNGAI JERING, KECAMATAN KUANTAN TENGAH
Judul Penelitian : "PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN RESPONSIBILITAS TERHADAP POTENSI KECURANGAN (FRAUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)"
Untuk melakukan Penelitian di : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 29 April 2025

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

JHON PITTE ALSI, S. IP
Pembina Tk. I. IV/b
NIP 19801012 200501 1 006



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

CS Dipindai dengan CamScanner

Lembar Kuisisioner Penelitian

Assalamualaikum Wr. Wb

Perkenalkan, nama saya Latifa Azzahra Fitri, mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, Jurusan Akutansi. Bapak/Ibu/Saudara(i) yang saya hormati, mohon sekiranya Bapak/Ibu/Saudara(i) berkenan untuk dapat mengisi kuisisioner di bawah ini sesuai dengan petunjuk pengisian dan dilakukan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kuisisioner ini bukanlah pertanyaan yang memiliki tolak ukur jawaban benar atau salah. Seluruh informasi yang diperoleh dari kuisisioner ini hanya akan saya gunakan dalam rangka melakukan penelitian skripsi jurusan Akutansi, Universitas Islam Indonesia.

Hasil penelitian ini semata-mata bertujuan keilmuan dan tidak akan disajikan kepada pihak luar. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga atas kebaikan Bapak/Ibu/Saudara(i) kelak akan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Hormat saya,

Latifa Azzahra Fitri

**Kuisisioner Penelitian “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan
Responsibilitas Terhadap Potensi Kecurangan (*Fraud*) Di Lingkungan
Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)”**

Profil Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
3. Usia : ☐ 21 – 30 tahun ☐ 31 – 40 tahun
☐ 41 – 50 tahun ☐ > 50 tahun
4. Pendidikan : ☐ SMA ☐ Diploma
☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
5. Lama Bekerja : ☐ 1 – 5 tahun ☐ 6 – 10 tahun
☐ 11 – 15 tahun ☐ 15 – 20 tahun
☐ > 20 tahun
6. Jabatan :

A. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

1. Sebelum mengisi kuisisioner ini, dimohon Bapak/Ibu/Saudara(i) ` membaca setiap butir pernyataan dengan cermat
2. Bapak/ Ibu/Saudara(i) diminta untuk mengisis pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan pilihan
3. Untuk setiap butir pernyataan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif jawaban
4. Semua pernyataan yang ada, mohon dijawab dengan sesuai dan tanpa ada satupun yang terlewati

B. Keterangan Jawaban

Terdapat empat (4) pilihan jawaban yaitu :

1 = STS = Sangat Tidak Setuju

2 = TS = Tidak Setuju

3 = N = Netral

4 = S = Setuju

5 = SS = Sangat Setuju

**Kuisisioner Penelitian “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan
Responsibilitas Terhadap Potensi Kecurangan (*Fraud*) Di Lingkungan
Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)”**

Anda hanya boleh menjawab "N" atau Netral jika anda benar-benar tidak mengetahui atau belum pernah mengalami hal-hal atau kejadian yang dinyatakan dalam pernyataan kuisisioner ini.

Variabel Transaparansi						
No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Di tempat saya bekerja tersedia akses masyarakat terhadap informasi mengenai rencana penggunaan alokasi dana daerah					
2	Di tempat saya bekerja ada musyawarah rencana penggunaan alokasi dana daerah					
3	Di tempat saya bekerja ada kerja sama dengan media massa dalam peningkatan informasi					
4	Di tempat saya bekerja disediakan informasi kepada masyarakat agar mengetahui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah					
5	Di tempat saya bekerja disediakan informasi mengenai laporan berkala penggunaan alokasi dana daerah					
6	Di tempat saya bekerja terdapat pemberian informasi bahwa Pemerintah daerah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, dan jelas sehingga mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan					

7	Di tempat saya bekerja masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan pertanggungjawaban alokasi dana daerah					
8	Di tempat saya bekerja disediakan dengan mudah informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana daerah					
9	Di tempat saya bekerja disediakan informasi bahwa pemerintah daerah telah menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses pelaksanaan alokasi dana					
10	Di tempat saya bekerja diberikan informasi bahwa pemerintah daerah merima kritik dan saran dari. Masyarakat apabila tidak sesuai yang diharapkan					

Variabel Akuntabilitas						
No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Di tempat saya bekerja terdapat informasi bahwa Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan bertanggungjawab kepada Masyarakat					
2	Di tempat saya bekerja diberikan informasi bahwa Alokasi dana daerah digunakan dengan jelas dan bertanggungjawab					
3	Di tempat saya bekerja disediakan informasi bahwa Penggunaan dana daerah didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku					
4	Di tempat saya bekerja diberi informasi bahwa Masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap					

	program-program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah					
5	Di tempat saya bekerja diinformasikan bahwa Data yang disajikan oleh pemerintah daerah merupakan data yang akurat dan benar					
6	Di tempat saya bekerja disediakan informasi bahwa terdapat pelaporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan alokasi dana daerah kepada Masyarakat					
7	Di tempat saya bekerja disediakan informasi bahwa Pemerintah daerah memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah daerah					
8	Di tempat saya bekerja disediakan informasi bahwa Masyarakat dengan mudah dapat memahami setiap informasi tentang kebijakan yang diambil dan disampaikan oleh pemerintah daerah					
9	Di tempat saya bekerja disediakan informasi bahwa pemerintah daerah telah melakukan analisis keuangan pada setiap kegiatan atau program yang telah selesai dilaksanakan					
10	Di tempat saya bekerja disediakan informasi bahwa pemerintah daerah membuat rencana kinerja sebelumnya untuk melihat perkembangan pelaksanaan dalam suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah					

Variabel Responsibilitas						
No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Di tempat saya bekerja, tersedia data informasi tentang kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku					
2	Di tempat saya bekerja, seluruh pegawai berpegang pada prinsip kehati-hatian dan mematuhi peraturan terhadap perundang-undangan yang berlaku					
3	Di tempat saya bekerja, melaksanakan tanggungjawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat					
4	Di tempat saya bekerja, senantiasa keluhan dari masyarakat publik					
5	Di tempat saya bekerja, seluruh pegawai selalu bersikap baik dalam merespon keluhan					
6	Pada instansi saya bekerja, selalu menjadikan bahan evaluasi kedepannya dari keluhan yang diterima					
7	Di tempat saya bekerja, selalu melakukan tindakan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan					
8	Di tempat saya bekerja, terdapat evaluasi sebagai bahan proses perbaikan program kerja					
9	Di tempat saya bekerja, selalu diutamakan kode					

	etik pelayanan					
10	Di tempat saya bekerja, memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana yang baik					

Variabel Potensi Kecurangan (<i>fraud</i>)						
No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Di tempat saya bekerja masih terdapat praktik suap dan pungli masih terjadi di lingkungan pemerintahan daerah					
2	Di tempat saya bekerja, tidak ada system pengendalian internal yang memadai di pemerintahan daerah untuk mencegah kecurangan					
3	Di tempat saya bekerja, melakukan pencatatan transaksi yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya					
4	Di tempat saya bekerja, masih terdapat pungutan untuk penambahan penerimaan dana diluar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan					
5	Di tempat saya bekerja, menyajikan laporan keuangan yang direkayasa untuk menutupi adanya penggelapan					
6	Ditempat saya bekerja, masih terjadi pemalsuan dokumen-dokumen dalam membuat laporan keuangan					
7	Di tempat saya bekerja menginformasikan bahwa apabila sisa anggaran dana daerah diambil pihak					

	lain sebagai keuntungan pribadi, bukan termasuk suatu masalah					
8	Di tempat saya bekerja, menjadi suatu hal yang wajar apabila dilakukan penghapusan atau penghilangan suatu transaksi yang terjadi di pemerintahan daerah					
9	Di tempat saya bekerja , pengungkapan atas laporan keuangan daerah kurang memadai dan ada yang ditutup-tutupi					
10	Di tempat saya bekerja , kesesuaian antara pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh aparatur daerah dengan manfaat yang diperoleh masyarakat menunjukkan aparatur daerah pemerintahan dapat dipercaya					

Lampiran 4 Tabulasi Data Penelitian

Timestamp	Nama (boleh inisial)	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Lama Bekerja	Jabatan
2025/04/28 8:28:15 AM GMT+7	Masrul Hakim	Pria	>50 tahun	S3	16 - 20 tahun	Kepala BPKAD
2025/04/28 8:51:47 AM GMT+7	LJ	Pria	21 - 30 tahun	S1	1 - 5 tahun	Fungsional
2025/04/28 8:56:19 AM GMT+7	Rahayu	Wanita	21 - 30 tahun	S1	1 - 5 tahun	Fungsional
2025/04/28 2:05:58 PM GMT+7	Gz	Pria	21 - 30 tahun	S1	1 - 5 tahun	fungsional
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+7	AL	Wanita	21 - 30 tahun	S1	1 - 5 tahun	Fungsional
2025/04/29 3:50:44 PM GMT+7		Pria	41 - 50 tahun	S1	> 20 tahun	Penata Laporan Keuangan
2025/04/30 9:39:01 AM GMT+7	A	Wanita	21 - 30 tahun	S1	1 - 5 tahun	Staf
2025/04/30 9:41:02 AM GMT+7	L	Wanita	21 - 30 tahun	S1	1 - 5 tahun	Staf
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+8	Z	Wanita	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Analisis Keuangan
2025/04/29 3:50:44 PM GMT+8	SH	Pria	41 - 50 tahun	S1	11 - 15 tahun	Analisis perancang keuangan
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+8	S	Wanita	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Kassubag Umum
2025/04/29 3:50:44 PM GMT+8	F	Pria	41 - 50 tahun	S1	11 - 15 tahun	Kasubbid Belanja Daerah
2025/04/30 9:39:01 AM GMT+8	LA	Wanita	21 - 30 tahun	S1	1 - 5 tahun	Staff
2025/04/30 9:41:02 AM GMT+8	FP	Wanita	21 - 30 tahun	S1	6 - 10 tahun	staf akuntansi
2025/04/30 11:07:31 AM GMT+7	Sepriadi arnando	Pria	21 - 30 tahun	S1	1 - 5 tahun	Staff
2025/04/30 11:10:55 AM GMT+7	Ben	Pria	41 - 50 tahun	S1	16 - 20 tahun	Staf
2025/04/29 3:50:44 PM GMT+8	Uli marda	Wanita	31 - 40 tahun	SMA	6 - 10 tahun	Staf BPKAD bidang anggaran
2025/04/30 9:39:01 AM GMT+8	H	Wanita	41 - 50 tahun	SMA	11 - 15 tahun	Staff
2025/04/30 2:56:46 PM GMT+7	Y	Pria	41 - 50 tahun	Diploma	11 - 15 tahun	Staff
2025/04/30 2:57:04 PM GMT+7	UU	Pria	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Staff
2025/04/30 3:00:52 PM GMT+7	Ika	Pria	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Staff
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+8	O	Wanita	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Staff
2025/04/29 3:50:44	T	Pria	21 - 30	S1	1 - 5	Staff

PM GMT+8			tahun		tahun	
2025/04/30 9:39:01 AM GMT+8	Ika	Wanita	21 - 30 tahun	S1	1 - 5 tahun	Staff
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+8	Rahayu	Wanita	>50 tahun	S1	16 - 20 tahun	Staff
2025/04/29 3:50:44 PM GMT+8	E	Pria	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Kasubbag/Kasubbag Umum
2025/04/30 9:39:01 AM GMT+8	AA	Pria	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Kasubbag/Kasubbag Umum
2025/04/30 9:41:02 AM GMT+8	DE	Pria	41 - 50 tahun	S1	11 - 15 tahun	Kasubbag/Kasubbag Umum
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+8	GG	Pria	41 - 50 tahun	Diplom a	11 - 15 tahun	Staff
2025/04/29 3:50:44 PM GMT+8	JH	Wanita	41 - 50 tahun	Diplom a	11 - 15 tahun	Staff

Timestamp	Nama (boleh inisial)	Jenis Kelamin	Usia	Pendidik an	Lama Bekerja	Jabatan
2025/04/30 9:39:01 AM GMT+8	K	Wanita	41 - 50 tahun	SMA	11 - 15 tahun	Staff
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+8	HJ	Wanita	41 - 50 tahun	Diploma	11 - 15 tahun	Staff
2025/04/29 3:50:44 PM GMT+8	H	Pria	31 - 40 tahun	Diploma	6 - 10 tahun	Staff
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+8	IY	Pria	31 - 40 tahun	Diploma	6 - 10 tahun	Staff
2025/04/29 3:50:44 PM GMT+8	K	Wanita	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Staff
2025/04/30 9:39:01 AM GMT+8	L	Pria	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Staff
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+8	T	Wanita	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Staff
2025/04/29 3:50:44 PM GMT+8	A	Pria	21 - 30 tahun	S1	1 - 5 tahun	Staff
2025/04/30 9:39:01 AM GMT+8	P	Wanita	21 - 30 tahun	S2	1 - 5 tahun	Staff
2025/04/30 9:41:02 AM GMT+8	I	Wanita	21 - 30 tahun	S2	1 - 5 tahun	Fungsio nal
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+8	AL	Wanita	21 - 30 tahun	S2	1 - 5 tahun	Fungsio nal
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+8	P	Pria	21 - 30 tahun	S2	1 - 5 tahun	Fungsio nal
2025/04/29 3:50:44 PM GMT+8	M	Pria	31 - 40 tahun	S2	6 - 10 tahun	Fungsio nal
2025/04/30 9:39:01 AM GMT+8	B	Pria	31 - 40 tahun	Diploma	6 - 10 tahun	Staff
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+8	Agung	Pria	31 - 40 tahun	Diploma	6 - 10 tahun	Fungsio nal
2025/04/29 3:50:44 PM GMT+8	IIS	Pria	31 - 40 tahun	Diploma	6 - 10 tahun	Fungsio nal
2025/04/30 9:39:01 AM GMT+8	ida	Wanita	21 - 30 tahun	S1	1 - 5 tahun	Staff
2025/04/30 9:41:02 AM GMT+8	l	Wanita	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Fungsio nal
2025/04/30 11:07:31 AM GMT+7	km	Pria	>50 tahun	S1	16 - 20 tahun	Staff
2025/04/28 8:28:15 AM GMT+7	uy	Pria	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Fungsio nal
2025/04/28 8:51:47 AM GMT+7	T	Wanita	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Staff
2025/04/28 8:56:19 AM GMT+7	FG	Wanita	>50 tahun	S1	> 20 tahun	Staff
2025/04/28 8:28:15 AM GMT+7	AB	Pria	31 - 40 tahun	S1	6 - 10 tahun	Staff
2025/04/28 8:51:47 AM GMT+7	BM	Wanita	>50 tahun	S1	> 20 tahun	Fungsio nal
2025/04/28 8:56:19 AM GMT+7	FR	Pria	>50 tahun	SMA	16 - 20 tahun	Staff
2025/04/28 8:28:15 AM GMT+7	YA	Pria	41 - 50 tahun	S1	11 - 15 tahun	Staff
2025/04/28 8:51:47 AM GMT+7	NO	Wanita	>50 tahun	S1	16 - 20 tahun	Staff
2025/04/28 8:56:19 AM GMT+7	A	Pria	>50 tahun	S1	16 - 20 tahun	Fungsio nal
2025/04/28 2:05:58 PM GMT+7	B	Pria	31 - 40 tahun	S1	1 - 5 tahun	Staff
2025/04/28 2:06:08 PM GMT+7	GG	Wanita	21 - 30 tahun	Diploma	1 - 5 tahun	Staff
2025/04/29 3:50:44 PM GMT+7	UT	Wanita	21 - 30 tahun	Diploma	1 - 5 tahun	Staff

Variabel Transparansi (X1)

N O	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1.1 0	Rata -rata
1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4.9
2	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4.6
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4.4
5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4.7
6	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4.8
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4.8
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4.4
14	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3.3
15	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3.5
16	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4.4
17	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4.4
18	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4.4
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.9
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4.5
24	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4.9
25	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4.3
26	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3.3
27	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3.6
28	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4.4
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	5	5	5	3	3	5	3	5	5	5	4.4
31	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	4.8
32	5	5	5	3	3	3	5	5	5	5	4.4
33	4	4	5	5	5	3	3	5	5	5	4.4
34	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	4.7
35	5	4	4	4	4	5	3	3	4	5	4.1
36	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3.3
37	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3.3
38	5	4	5	4	4	4	4	5	5	2	4.2

Akuntabilitas (X2)

[illegible]

N O	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5	X2. 6	X2. 7	X2. 8	X2. 9	X2.1 0	Rata -rata
39	4	4	5	4	4	4	5	4	5	1	4
40	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4.6
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.9
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.9
43	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4.7
44	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4.8
45	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4.6
46	5	5	5	5	5	4	4	4	5	3	4.5
47	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4.3
48	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4.4
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
50	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4.6
51	4	4	4	4	4	4	4	3	2	5	3.8
52	4	4	5	4	4	4	5	3	3	5	4.1
53	4	5	4	5	5	4	5	3	5	5	4.5
54	5	4	5	5	5	5	5	3	3	5	4.5
55	5	4	5	5	5	5	5	3	3	5	4.5
56	4	5	4	4	4	4	5	5	5	3	4.3
57	4	5	5	5	5	4	5	3	3	5	4.4
58	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4.7
59	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	4.6
60	5	4	5	5	5	5	2	5	3	1	4
61	4	4	5	4	2	1	2	5	5	5	3.7

Responsibilitas (X3)

N O	X3. 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	X3. 5	X3. 6	X3. 7	X3. 8	X3. 9	X3.1 0	Rata -rata
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4.5
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4.3
5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4.6
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4.4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3.4
16	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4.6
17	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4.2
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4.5
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4.3
22	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4.6
23	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4.8
24	5	5	5	5	4	4	3	5	4	3	4.3
25	5	5	4	5	5	4	3	5	5	5	4.6
26	4	4	4	5	4	5	5	4	5	3	4.3
27	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4.6
28	4	4	5	5	4	5	5	3	3	2	4
29	4	4	4	5	4	3	3	3	5	4	3.9
30	5	4	5	5	5	5	3	5	3	5	4.5
31	4	5	5	5	4	5	3	4	5	4	4.4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4.3
34	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4.6
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
37	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4.8
38	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4.6

Pencegahan Kecurangan (Y)

NO	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Rata-rata
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1.4
2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1.7
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	2	1	2	1	1	2	2	2	1	4	1.8
5	1	1	2	2	1	1	2	1	1	4	1.6
6	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1.6
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1.2
14	3	3	3	4	2	3	1	1	2	4	2.6
15	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3.5
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1.3
17	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2.4
18	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1.2
19	3	3	3	4	2	3	1	1	2	4	2.6
20	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3.5
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1.3
22	2	2	2	2	2	4	2	2	2	3	2.3
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1.3
24	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2.4
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1.2
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1.3
27	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2.4
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1.2
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1.3
30	2	2	2	2	2	4	2	2	2	3	2.3
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1.2
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1.2
33	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2.4
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1.3
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1.3
36	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2.4
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1.1
38	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2.4

NO	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Rata-rata
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1.1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1.1
41	2	2	2	2	2	4	2	2	2	3	2.3
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1.1
43	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2.2
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1.1
45	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2.2
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1.2
47	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2.2
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1.2
50	1	2	2	2	2	4	2	3	2	1	2.1
51	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1.3
52	2	3	2	2	2	4	2	3	2	3	2.5
53	1	1	1	2	1	1	1	1	4	2	1.5
54	2	2	2	2	2	4	2	2	4	2	2.4
55	1	1	1	3	1	1	4	1	4	3	2
56	2	2	2	3	2	4	4	2	4	2	2.7
57	1	1	1	3	1	4	4	1	4	2	2.2
58	1	1	1	2	1	4	1	1	1	4	1.7
59	1	1	1	4	1	4	1	1	1	3	1.8
60	2	2	2	4	2	4	2	2	2	4	2.6
61	1	1	1	1	4	4	1	1	1	3	1.8

Lampiran 5 Hasil Pengolahan Data Penelitian

KARAKTERISTIK RESPONDEN

		Jenis Kelamin			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Pria	32	52.5	52.5	52.5
	Wanita	29	47.5	47.5	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

		Usia			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	21 - 30 tahun	19	31.1	31.1	31.1
	31 - 40 tahun	22	36.1	36.1	67.2
	41 - 50 tahun	12	19.7	19.7	86.9
	>50 tahun	8	13.1	13.1	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

		Pendidikan Terakhir			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	SMA	4	6.6	6.6	6.6
	Diploma	11	18.0	18.0	24.6
	S1	40	65.6	65.6	90.2
	S2	5	8.2	8.2	98.4
	S3	1	1.6	1.6	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

Lama Bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 - 5 tahun	19	31.1	31.1	31.1
	6 - 10 tahun	22	36.1	36.1	67.2
	11 - 15 tahun	10	16.4	16.4	83.6
	16 - 20 tahun	7	11.5	11.5	95.1
	> 20 tahun	3	4.9	4.9	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kepala Dinas BPKAD	1	1.6	1.6	1.6
	Kasubbag/Kasubbag Umum	6	9.8	9.8	11.5
	Staff	42	68.9	68.9	80.3
	Fungsional	12	19.7	19.7	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

Analisis Deskriptif**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi (X1)	61	28.00	50.00	42.0656	6.08788
Akuntabilitas (X2)	61	30.00	50.00	42.5902	5.58682
Responsibilitas (X3)	61	28.00	50.00	40.7213	6.67116
Tingkat Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)	61	10.00	35.00	18.9672	6.73787
Valid N (listwise)	61				

Uji Validitas Data dan Reliabilitas Variabel Transparansi

		Correlations										
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
											0	total
X1.1	Pearson Correlation	1	.454*	.387	.141	.489*	.475*	.615*	.309	.433*	.392	.683*
	Sig. (2-tailed)		.023	.056	.500	.013	.016	.001	.133	.031	.053	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X1.2	Pearson Correlation	.454*	1	.558*	.535*	.799*	.516*	.638*	.516*	.365	.371	.837*
	Sig. (2-tailed)	.023		.004	.006	.000	.008	.001	.008	.072	.068	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X1.3	Pearson Correlation	.387	.558*	1	.280	.749*	.020	.500*	.415*	.119	.217	.603*
	Sig. (2-tailed)	.056	.004		.175	.000	.925	.011	.039	.570	.297	.001
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X1.4	Pearson Correlation	.141	.535*	.280	1	.517*	.142	.360	.488*	.036	.488*	.574*
	Sig. (2-tailed)	.500	.006	.175		.008	.499	.078	.013	.865	.013	.003
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X1.5	Pearson Correlation	.489*	.799*	.749*	.517*	1	.300	.650*	.518*	.312	.409*	.823*
	Sig. (2-tailed)	.013	.000	.000	.008		.144	.000	.008	.129	.042	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X1.6	Pearson Correlation	.475*	.516*	.020	.142	.300	1	.525*	.316	.647*	.512**	.648*

	Sig. (2-tailed)	.016	.008	.925	.499	.144		.007	.123	.000	.009	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X1.7	Pearson Correlation	.615*	.638*	.500*	.360	.650*	.525*	1	.525*	.229	.525**	.803*
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.011	.078	.000	.007		.007	.270	.007	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X1.8	Pearson Correlation	.309	.516*	.415*	.488*	.518*	.316	.525*	1	.394	.512**	.712*
	Sig. (2-tailed)	.133	.008	.039	.013	.008	.123	.007		.051	.009	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X1.9	Pearson Correlation	.433*	.365	.119	.036	.312	.647*	.229	.394	1	.394	.570*
	Sig. (2-tailed)	.031	.072	.570	.865	.129	.000	.270	.051		.051	.003
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X1.10	Pearson Correlation	.392	.371	.217	.488*	.409*	.512*	.525*	.512*	.394	1	.687*
	Sig. (2-tailed)	.053	.068	.297	.013	.042	.009	.007	.009	.051		.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
total	Pearson Correlation	.683*	.837*	.603*	.574*	.823*	.648*	.803*	.712*	.570*	.687**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.003	.000	.000	.000	.000	.003	.000	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X2.10	Pearson Correlation	.337	.630*	.598*	.372	.447*	.665*	.285	.434*	.391	1	.674*
	Sig. (2-tailed)	.100	.001	.002	.067	.025	.000	.168	.030	.053		.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
total	Pearson Correlation	.802*	.881*	.723*	.764*	.853*	.896*	.693*	.808*	.831*	.674**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	25	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	25	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.929	10

Variabel Responsibilitas

		Correlations										
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.1 0	total
X3.1	Pearson Correlation	1	.740*	.728*	.423*	.758*	.536*	.910*	1.000*	.646*	.830**	.907*
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.035	.000	.006	.000	.000	.000	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X3.2	Pearson Correlation	.740**	1	.559*	.379	.562*	.578*	.648*	.740**	.831*	.423*	.748*
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.062	.003	.002	.000	.000	.000	.035	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X3.3	Pearson Correlation	.728**	.559*	1	.759*	.797*	.638*	.666*	.728**	.690*	.894**	.879*
	Sig. (2-tailed)	.000	.004		.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X3.4	Pearson Correlation	.423*	.379	.759*	1	.782*	.840*	.608*	.423*	.527*	.620**	.735*
	Sig. (2-tailed)	.035	.062	.000		.000	.000	.001	.035	.007	.001	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X3.5	Pearson Correlation	.758**	.562*	.797*	.782*	1	.868*	.855*	.758**	.746*	.797**	.932*
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X3.6	Pearson Correlation	.536**	.578*	.638*	.840*	.868*	1	.692*	.536**	.764*	.505*	.799*

	Sig. (2-tailed)	.006	.002	.001	.000	.000		.000	.006	.000	.010	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X3.7	Pearson Correlation	.910**	.648*	.666*	.608*	.855*	.692*	1	.910**	.570*	.768**	.909*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000		.000	.003	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X3.8	Pearson Correlation	1.000*	.740*	.728*	.423*	.758*	.536*	.910*	1	.646*	.830**	.907*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.035	.000	.006	.000		.000	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X3.9	Pearson Correlation	.646**	.831*	.690*	.527*	.746*	.764*	.570*	.646**	1	.545**	.801*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.007	.000	.000	.003	.000		.005	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X3.10	Pearson Correlation	.830**	.423*	.894*	.620*	.797*	.505*	.768*	.830**	.545*	1	.866*
	Sig. (2-tailed)	.000	.035	.000	.001	.000	.010	.000	.000	.005		.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
total	Pearson Correlation	.907**	.748*	.879*	.735*	.932*	.799*	.909*	.907**	.801*	.866**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Y5	Pearson Correlation	.600**	.597**	.821**	.252	1	.429*	.387	.519**	.780**	.000	.687**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.000	.224		.032	.056	.008	.000	1.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Y6	Pearson Correlation	.374	.580**	.444*	.364	.429*	1	.235	.393	.574**	.540**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.065	.002	.026	.074	.032		.258	.052	.003	.005	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Y7	Pearson Correlation	.387	.474*	.583**	.177	.387	.235	1	.275	.633**	.130	.563**
	Sig. (2-tailed)	.056	.017	.002	.397	.056	.258		.183	.001	.535	.003
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Y8	Pearson Correlation	.283	.525**	.414*	.166	.519**	.393	.275	1	.443*	.257	.597**
	Sig. (2-tailed)	.170	.007	.040	.428	.008	.052	.183		.026	.214	.002
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Y9	Pearson Correlation	.590**	.760**	.826**	.429*	.780**	.574**	.633**	.443*	1	.213	.837**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.032	.000	.003	.001	.026		.307	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Y10	Pearson Correlation	.258	.301	.281	.268	.000	.540**	.130	.257	.213	1	.581**
	Sig. (2-tailed)	.213	.143	.173	.195	1.000	.005	.535	.214	.307		.002
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
total	Pearson Correlation	.720**	.831**	.849**	.592**	.687**	.755**	.563**	.597**	.837**	.581**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.003	.002	.000	.002	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	25	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	25	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.853	10

ASUMSI KLASIK NORMALITAS DATA

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		61
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.47312640
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.098
	Negative	-.058
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

MULTIKOLINIERITAS

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	58.085	7.813		7.435	.000		
Transparansi (X1)	.318	.128	.287	2.490	.016	.869	1.150
Akuntabilitas (X2)	.269	.130	.223	2.061	.044	.991	1.010
Responsibilitas (X3)	.351	.117	.348	3.000	.004	.862	1.160

- a. Dependent Variable: Tingkat Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)

HETEROKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.669	4.790		1.601	.115		
	Transparansi (X1)	-.128	.078	-.226	-1.637	.107	.869	1.150
	Akuntabilitas (X2)	-.045	.080	-.073	-.568	.572	.991	1.010
	Responsibilitas (X3)	.095	.072	.183	1.322	.192	.862	1.160

a. Dependent Variable: ABS_RES

AUTOKORELASI**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.683 ^a	.640	.605	5.61531	1.950

a. Predictors: (Constant), Responsibilitas (X3), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)

b. Dependent Variable: Tingkat Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)

ANALISIS REGRESI**Variables Entered/Removed^a**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Responsibilitas (X3), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1) ^b		Enter

a. Dependent Variable: Tingkat Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)

b. All requested variables entered.

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.683 ^a	.640	.605	5.61531	1.950

a. Predictors: (Constant), Responsibilitas (X3), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)

b. Dependent Variable: Tingkat Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)

Uji F**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	926.628	3	308.876	9.796	.000 ^b
	Residual	1797.307	57	31.532		
	Total	2723.934	60			

a. Dependent Variable: Tingkat Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)

b. Predictors: (Constant), Responsibilitas (X3), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)

Uji T**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	58.085	7.813		7.435	.000	
	Transparansi (X1)	.318	.128	.287	2.490	.016	.869 1.150
	Akuntabilitas (X2)	.269	.130	.223	2.061	.044	.991 1.010
	Responsibilitas (X3)	.351	.117	.348	3.000	.004	.862 1.160

a. Dependent Variable: Tingkat Potensi Kecurangan (Fraud) (Y)